

PERCATURAN PARTAI POLITIK ISLAM DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana S-1
Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam



Oleh :

NUR ISNAINI
NIM : AO.2.3.95.105

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K A-1919 040 SK1	No. REG : 040
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Ilmu dan politik

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ADAB
JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM**

1999

NOTA PEMBIMBING

Bahwa Skripsi saudara Nur Isnaini ini telah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, untuk itu harap segera diadakan munaqosah skripsi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Surabaya. 26 Juli 1999
Pembimbing



DRS. ABDUL AZIZ MEDAN MSI
NIP. 150 221 316

Departemen Agama
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Adab Surabaya

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang ujian Munaqasah
Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 7 Agustus 1999

Dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas sekaligus salah
satu syarat ujian akhir progam Strata Satu (S.1) guna memperoleh gelar
Sarjana Agama dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Fakultas
Adab IAIN Sunan Ampel.

Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang ujian munaqasah ini.

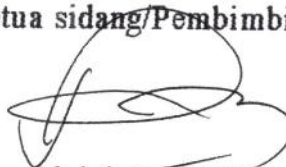
Surabaya, 10 Agustus 1999

Dekan,

Dr. Ali Mufrodi, MA
NIP. 150 203 741

Tim Dewan penguji

Ketua sidang/Pembimbing


Drs. Abdul Aziz, M Si
NIP. 150 221 316

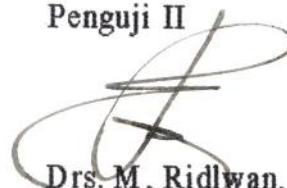
Sekretaris


Drs. Nur Rokhim
NIP. 150 243 997

Penguji I


Dr. Ali Mufrodi, MA
NIP. 150 203 741

Penguji II


Drs. M. Ridwan, M Si
NIP. 150 231 822

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
NOTA PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Penegasan Judul	5
D. Ruang Lingkup dan Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan kegunaan Penulisan	7
F. Methodologi Penulisan	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II : KEHIDUPAN POLITIK MENJELANG DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Keadaan Politik Pada Masa Konstituante	12
B. Faktor kegagalan Konstituante	27

BAB III: DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Pengertian Demokrasi Terpimpin	33
B. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin	41

BAB IV: PERCUTURAN PARTAI POLITIK ISLAM

A. Persepsi Umat Islam Terhadap Demokrasi Terpimpin	55
B. Partai-Politik Islam Dalam Demokrasi Terpimpin	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa tahun 1957-1965 merupakan masa ketika peranan demokrasi Indonesia bukan saja menurun tetapi hampir saja berganti menjadi diktator. Terutama dengan berlakunya kembali UUD 1945 pada tahun 1959, masa ini mencatat bangkit dan berkembangnya suatu pemerintahan otokratis yang menumpas tanpa segan oposisi atau pandangan yang tidak menyetujuinya. Sistem ini disebut secara populer Demokrasi Terpimpin, nama yang diberikan presiden Soekarno sendiri; sistem yang menurut dia sesuai dengan keadaan dan keperluan tanah air.¹ Statemen di atas dipertegas lagi oleh Bung Hatta yang menyebut Demokrasi Terpimpin sebagai

¹ Deliar Noer, *Partai Politik Islam di Pentas Nasional* (Jakarta : Grafiti Pers, Cet. I, 1987), Hal. 349

suatu Diktator yang didukung oleh golongan-golongan yang tertentu.²

Secara resmi periode Demokrasi Terpimpin bermula dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit itu menyatakan berlakunya kembali UUD 1950 yang dinyatakan telah habis masa berlakunya. Juga melalui Dekrit itu majelis Konstituante yang dibentuk pada tahun 1956 dinyatakan bubar atas dasar ketidakmampuan majelis ini merampungkan tugasnya, terutama dalam menetapkan dasar negara yaitu dasar Pancasila atau dasar Islam.³

Pada awalnya sebelum Dekrit diumumkan oleh Presiden Soekarno, di dalam majelis Konstituante partai-partai politik Islam menentang gerakan Soekarno tersebut. Namun sesudah dekrit, partai-partai Islam terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah terdiri dari Nahdlatul 'Ulama' (NU), partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), mereka memihak Soekarno dan menyertai Demokrasi Terpimpin.

² Drs. M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1993) Hal.149

³ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, Cet. I, 1988) Hal.2

Sedang kelompok yang kedua adalah majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang mana partai ini sejak awal memang menentang ide Demokrasi Terpimpin yang mengakibatkan partai ini diperintahkan bubar pada akhir tahun 1960 oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno.⁴

Dalam menghadapi rezim Soekarno ini partai-partai Islam kecuali Masyumi tidak berani menentang dan tidak berdaya menghadapi politik Soekarno yang lebih menguntungkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Walaupun mereka (parta-partai Islam) berpotensi dan didukung oleh mayoritas umat Islam Indonesia.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah :

1. Demokrasi Terpimpin secara resmi bermula dengan dikeluarkannya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Mulai dekrit itu Majelis Konstituante yang dibentuk tahun 1956 dinyatakan bubar karena ketidakmampuan majelis ini merampungkan tugasnya, terutama dalam menentukan dan

⁴ A. Syafi'i Ma'arif. 1988, Hal.3

menetapkan dasar negara Pancasila atau dasar Islam. Kenapa hal ini bisa terjadi?, hal inilah yang menarik untuk dibahas.

2. Dari hasil pemilu tahun 1955 di mana partai-partai politik Islam mempunyai kekuatan besar bila dibandingkan dengan yang lainnya, seperti Masyumi menempati urutan nomer dua setelah PNI dan NU berada pada urutan ketiga dan ditambah lagi Perti dan PSII yang didukung oleh mayoritas bangsa Indonesia yang
3. beragama Islam. Tetapi mengapa partai-partai politik Islam yang mempunyai kekuatan begitu besar dapat dikalahkan oleh konsep Demokrasi Terpimpin dan partai-partai politik tersebut seakan-akan kehilangan dunia politiknya karena tidak dapat menyampaikan aspirasi rakyat.
4. Di sisi lain, tampak kecenderungan Soekarno kepada Komunis terbukti dengan adanya Nasionalis Agama Dan Komunis (NASAKOM), yang mana NASAKOM adalah merupakan usaha Soekarno dalam rangka menggabungkan antara Nasionalis, Agama, dan Komunis. Tetapi mengapa partai-partai politik Islam itu mau menerima NASAKOM, terkecuali Masyumi.

C. Penegasan Judul

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Agar tidak terdapat kesalahpahaman dan mendapat pengertian

yang jelas terhadap skripsi ini, maka perlu kiranya penuli memberikan penjelasan pada arti kata judul tersebut :

- Percaturan :

- Siasat politik, perjuangan politik.⁵ yang penulis maksud adalah perjuangan atau kiprah partai politik Islam.

- Partai :

Perkumpulan atau segolongan orang yang seazas, sehaluan dan setujuan (terutama) dalam bidang politik.⁶

- Politik :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengetahuan mengenai ketatanegaraan/kenegaraan.⁷

- Islam :

Ajaran yang dibawah oleh Nabi Muhammad.⁸

⁵ Depdikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cet. II, 1989) Hal.175

⁶ *ibid.* Hal.172

⁷ *ibid.* Hal. 765

⁸ *ibid.* Hal. 388

Partai Politik Islam adalah merupakan partai yang mewakili umat Islam untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

- Demokrasi Terpimpin

Suatu sistim demokrasi yang dijalankan dengan rancangan dan petunjuk-petunjuk yang tertentu.⁹ Yang ketetapannya diatur dalam ketetapan MPRS nomer VII/MPRS/1965.

D. Lingkup Pembahasan dan Rumusan Masalah

1. Lingkup Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini adalah meliputi :

- a. Latar belakang lahirnya Demokrasi Terpimpin
- b. Pengertian Demokrasi Terpimpin
- c. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
- d. Persepsi umat Islam terhadap Demokrasi Terpimpin dan partai-partai politik Islam yang ada dalam Demokrasi Terpimpin.

⁹ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.,

e. Rumusan Masalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Bagaimana kondisi partai-partai politik Islam pada masa Demokrasi Terpimpin ?

b. Bagaimana tanggapan Presiden Soekarno terhadap partai-partai politik Islam ?

c. Bagaimana kosekwensi dari sikap Presiden Soekarno terhadap partai-partai politik Islam ?

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendakdicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Berusaha untuk memaparkan segi positif dan negatif dari sistim Demokrasi Terpimpin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Berusaha untuk mengungkapkan mengapa kehidupan partai-partai politik Islam yang berpotensi dan didukung oleh mayoritas umat Islam dapat dibuat tidak berdaya.

3. Dengan mengetahui sistim pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin yang dipegang oleh Soekarno sebagai panglima tertinggi angkatan perang dan sekaligus sesepuh yang

akibatnya terjadi pemberontakan G.30/S PKI pada tahun 1965 yang menghancurkan bangsa Indonesia, maka kita akan lebih waspada dan berpengalaman terhadap langkah-langkah yang akan ditempuh dalam era reformasi ini.

F. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini metode yang dipakai meliputi :

1. **Heuristik**, yaitu pengumpulan data dari sumbernya. Maksudnya kegiatan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini dari sumbernya. Sedangkan sumber datanya menggunakan sumber **kepuustakaan, yaitu data yang diambil dari buku-buku**.
2. **Kritik**, yaitu kegiatan untuk menilai sumber data yang dibutuhkan dengan maksud untuk menentukan bahwa sumber-sumber data yang diperoleh, memang yang dicari. Kritik ini dinamakan kritik ekstern. Kritik intern bekerja setelah kritik ekstern, yaitu pengujian terhadap isi atau kandungan sumber, guna dapat memberikan informasi yang diperlukan (dapat dipertanggung jawabkan).

3. **Interpretasi**, yaitu kegiatan untuk menetapkan atau memberikan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh.¹⁰

4. **Penyajian Data.**

Adapun pola penyajian data, penulis sampaikan sebagai berikut :

- a. Informasi *deskriptif*, yaitu dengan menyajikan informasi data yang diperoleh yakni kepustakaan dalam bentuk apa adanya.
- b. Informasi *analisis*, yakni dengan menyajikan informasi data
- c. sejarah yang telah dianalisa.

G. **Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan atau gambaran secara garis besar dalam keseluruhan isi skripsi ini adalah :

Bab I : Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, alasan memilih judul, penegasan judul, lingkup pembahasan, dan rumusan masalah, tujuan

¹⁰ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta : Yayasan Idayu, 1978), Hal 40

penulisan, metode penulisan dan sistematika
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
penulisan.

- Bab II : Berisi tentang kehidupan politik menjelang Demokrasi Terpimpin yang meliputi keadaan politik pada masa konstituante dan faktor-faktor kegagalan konstituante.
- Bab III : Berisi tentang Demokrasi Terpimpin yang meliputi pengertian Demokrasi Terpimpin dan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.
- Bab IV : Berisi tentang percaturan partai-partai politik Islam yang meliputi persepsi umat Islam terhadap Demokrasi Terpimpin dan partai-partai politik Islam dalam Demokrasi Terpimpin.
- Bab V : Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.[]

BAB II

KEADAAN POLITIK

MENJELANG DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Keadaan Politik Pada Masa Konstituante

Kehidupan Partai Politik di tahun 1950-an bisa disebut sebagai masa di mana ditemukan iklim yang benar-benar memberikan angin bagi tumbuh suburnya partai politik. Dalam masa ini terlihat berbagai gejolak politik terutama di kabinet dan di parlemen. Dengan sistem pemerintahan "Parlementer" ini partai politik yang memiliki jumlah cukup banyak tersebut, dinamika politik bisa diamati terutama dari segi jatuh bangunnya kabinet. Karena mendapat mosi dari lawan politiknya, mengingat jumlah suara partai politik di parlemen saat itu tidak ada yang mayoritas mutlak apalagi mayoritas tunggal.¹¹

Sejak saat itu konflik-konflik tidak dapat dihindarkan. Pertentangan ideologi semakin memuncak. Menurut Arbi Sanit pada dasarnya faktor Ideologi inilah yang menjadi dasar pokok

¹¹ Drs. M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesi*, Jakarta, Rajawali Press, Cet. III, 1993, Hal. 107

pertikaian di antara partai-partai di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh belum adanya suatu ideologi yang mampu menyalurkan elit politik ke dalam suatu persetujuan yang mendasar mengenai politik, kenegaraan dan kemasyarakatan.¹²

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1960 (masa Demokrasi Liberal) tidak kurang dari 25 kabinet yang telah memerintah di Indonesia. Dari jumlah yang ada itu yang berhasil memerintah selama 12 sampai 13 bulan sebanyak 7 kabinet. Sedangkan yang 12 kabinet berumur 6 sampai 11 bulan dan yang 6 kabinet hanya berumur 1 sampai 4 bulan.¹³ Keadaan yang demikian inilah yang dijadikan standar ketidakstabilan politik pada masa itu.

Ketidakstabilan politik dan kegagalan-kegagalan yang dialami pada masa Demokrasi Liberal ini, mendorong timbulnya ide penyerdehanaan jumlah partai politik dan mengundang beberapa pihak, termasuk di dalamnya Soekarno untuk mencoba memakai sistem lain.

Tetapi Demokrasi Liberal mencatat satu peristiwa

¹² Arbi Sanit, *Sistim Politik Indonesia (Kestabilan Peta Kekuasaan Politik dan pembangunan)*, Jakarta, Rajawali, 1981, Hal. 48

¹³ Drs. M. Rusli Karim, 1993, Hal. 113

pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi yang cukup penting, yaitu diselenggarakannya pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemilihan umum ini dimaksudkan untuk membentuk dua badan legislatif. *Pertama*, Parlemen; *Kedua*, Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang permanen menggantikan UUDS 1950¹⁴.

Karena kabinet-kabinet koalisi partai sering jatuh, repolitisasi penduduk sebagai akibat persaingan partai-partai dan menyebarnya kekuatan rakyat ke dalam politik etnisitas dan sentrifugalisme ini, mendorong Soekarno untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin.

Sebenarnya keinginan Soekarno untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin itu sudah mulai tampak ketika beliau mengeluarkan statemen di hadapan pemuda di Jakarta tanggal 28 Oktober 1956, bahwa semua partai politik harus dikuburkan dalam rangka membuat jalan bagi tercapainya persatuan nasional.¹⁵

Pada kesempatan lain di Surabaya Soekarno juga mengatakan bahwa demokrasi ala Barat tidak sesuai lagi untuk diterapkan di

¹⁴ Drs. M. Rusli Karim, 1993, Hal. XI

¹⁵ Ganis Harsono, *Cakrawala Politik Era Soekarno*, (Jakarta, Idayu Press, Cet. I, 1985), Hal. 84

Indonesia. Bahwa Indonesia telah mempunyai bentuk demokrasi yang asli yaitu Demokrasi Terpimpin¹⁶

Pada masa itu telah disadari oleh M. Hatta bahwa Soekarno mau mengambil seluruh kekuasaan politik di tangannya sendiri yaitu dengan menerapkan Demokrasi Terpimpin. Akhirnya pada tanggal 1 Desember 1956, Mohammad .Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden.¹⁷

Pengunduran M. Hatta ini menimbulkan keresahan serta rangkaian protes, khususnya di kalangan masyarakat luar Jawa, serta di kalangan masyarakat yang anti komunis. Adanya simpati kepada Hatta ini telah memperkuat kecenderungan masyarakat luar Jawa anti Jakarta dan anti Soekarno.¹⁸ Inilah yang menjadi sumber timbulnya pemberontakan PRRI dan ditambah dengan adanya ketidakpuasan dengan sistem pemerintahan Soekarno.

Dalam suasana politik yang semakin memburuk dengan meluasnya pemberontakan di daerah-daerah dan tidak dicapainya

¹⁶ Ganis Harsono, 1985, Hal.

¹⁷ *Ibid*, Hal.

¹⁸ B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Grafitti Pers, 1985), Hal. 98

pemerintahan yang stabil, maka Soekarno melontarkan suatu gagasan untuk memperbaiki keadaan dan pemerintahan.

Pada tanggal 21 Pebruari 1957, presiden Soekarno mengumumkan konsepsinya mengenai Demokrasi Terpimpin dihadapkan para wakil partai politik. konsepsi ini dengan tujuan untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Dalam konsepsi itu yang dikehendaki Soekarno adalah adanya kabinet Gotong-Royong, yang di dalamnya setiap pemimpin partai mempunyai peluang yang sama untuk menjadi perdana menteri. Ia juga menghendaki adanya satu dewan penasehat nasional yang akan melibatkan semua unsur dari semua alas piramida.¹⁹ Dalam badan ini akan diangkat wakil-wakil dari golongan fungsional seperti petani, buruh, cendekiawan, tentara, politisi dan wakil dari golongan agama. Dan badan ini akan dipimpin langsung oleh Soekarno.

Agar secepatnya mendapatkan tanggapan dari masyarakat, maka Soekarno meminta kepada partai-partai politik untuk mengumumkan jawabannya terhadap konsepsi presiden ini adalah satu minggu. Dari partai-partai besar, kaum nasionalis (PNI) dan

¹⁹ Ganis Harsono, 1985, hal. 88

komunis menyatakan setuju. Sedangkan Masyumi dan partai Katolik menyatakan menentang. Partai-partai lainnya memberikan jawaban bersyarat, misalnya NU mau menerima tetapi dengan syarat PKI tidak diikuti sertakan.²⁰ Dan mereka berpendapat bahwa merubah sistem pemerintahan dan suasana ketatanegaraan secara radikal seperti itu adalah merupakan wewenang dari konstituante.

Sementara itu, di dalam sidang Majelis Monstituante terjadi perdebatan yang seru tentang jenis dasar negara yang akan dianut oleh Indonesia, yaitu : Islam, Pancasila ataukah sosial-ekonomi.

Partai-partai politik Islam memperoleh 230 kursi. Dengan komposisinya adalah Masyumi dengan 112 kursi, NU 91 kursi, PSII 16 kursi dan PERTI 7 kursi, ditambah partai-partai kecil lainnya 286 kursi. Berarti, partai-partai politik Islam memiliki 45 % kursi, sedangkan menurut UUDS 1950, penetapan Undang-Undang Dasar Baru harus didukung oleh 2/3 anggota konstituante yang hadir. Tanpa didukung partai politik lainnya, tidak mungkin para politisi Islam dapat menggolkan ideologi Islam sebagai dasar negara.²¹

²⁰ B.J. Boland, 1985, Hal. 92

²¹ Drs. Abd. Aziz Taba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996) Hal. 170-171

Melihat hasil-hasil yang telah dicapai Majelis Konstituante hingga waktu ini, maka pada tanggal 22 April 1959 pemerintah “muncul” untuk ketiga kalinya di depan sidang Pleno Konstituante Bandung dengan suatu usulan kongkrit mengenai UUD dalam bentuk anjuran *cekak aos* yang berbunyi :”Marilah kita kembali kepada UUD 1945”.²²

Yang pertama, Pemerintah di sidang Pleno Konstituante pada tanggal 10 Nopember 1956, bertepatan dengan pelantikan Konstituante itu sendiri. Dalam pidato pelantikan tersebut, Presiden menyampaikan kepada sidang Pleno Konstituante harapan-harapan mengenai UUD yang akan disusun itu. Sekalipun bukan berupa naskah atau konsep UUD, namun dalam pidato pelantikan tanggal 10 Nopember itu tercakup pokok-pokok pikiran mengenai konstitusi yang dianggap sebagai suatu “konsep khusus UUD”.

Kedua kalinya, pada tanggal 30 Juli 1958, pemerintah kembali “muncul” di depan sidang Pleno Konstituante. Setelah Konstituante berumur kurang lebih dua tahun dan melihat hasil-

²² J.C.T. Simorangkir S.H., *Penetapan UUD Di Lihat Dari Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : PTL. Gunung Agung, 1984), Hal.104

hasil yang dicapai hingga waktu itu belum memuaskan, maka pemerintah menganjurkan tiga hal, yaitu :

1. Beberapa pemikiran dan harapan mengenai materi konstitusi
2. Harapan mengadakan perubahan dalam cara kerjanya Konstituante , supaya bisa lebih cepat bekerja dalam menyelesaikan tugas kewajibannya.
3. Pemikiran mengenai kemungkinan menetapkan waktu (ancer-ancer) bagi penyelesaian tugas, jangan sampai bertele-tele tanpa akhir.

A dapun anjuran pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 yang disampaikan di depan sidang Pleno Konstituante pada tanggal 22 April 1959, disertai dengan 10 (sepuluh) pokok pikiran, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan “ Dokumen Historis” atas dasar nama revolusi, dimulai dan yang dapat dipakai untuk landasan guna penyelesaian Revolusi pada tingkatan sekarang.
2. Undang-Undang Dasar 1945 adalah cukup demokratis dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang tertulis

dalam salah satu sila dari Pancasila, yaitu :” Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan” (pembukaan UUD 1945).

3. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin terlaksananya prinsip[Demokrasi Terpimpin.
4. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin pemerintah yang stabil selama lima tahun, karena kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dibatasi dan kekuasaan tertinggi ada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Unsur golongan fungsional (karya) dapat dimasukkan ke dalam :

a. Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945)

b. Dewan Pertimbangan Agung (pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945)

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945)

6. Paralel dengan Demokrasi Terpimpin, maka kebijakan ekonomi Terpimpin didasarkan pada pasal 33, asal cukup dijelaskan nanti oleh perumusan-perumusan Dewan Perancang Nasional.
7. Sistim merubah dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 lebih fleksibel dan dapat dilakukan setiap waktu amat sangat terasa keperluannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara dua pertiga (2/3).
8. Undang-Undang Dasar 1945 ini dipertahankan sebagai keseluruhan.
9. Untuk mendekati hasrat golongan-golongan Islam, berhubung dengan penyelesaian dan pemeliharaan keamanan, diakui adanya "Piagam Jakarta" tertanggal 22 Juni 1945, yang ditanda tangani oleh Soekarno, Mohammad Hatta, A. A. Maramis, Abikusno Cokrosujoso, A.H. Kahar Muzakkir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wakhid Hayim dan Muhammad Yamin.
10. Perubahan, tambahan dan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilaksanakan dengan melalui

jalan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Permusyawaratan Rakyat.²³

Pada rapat-rapat atau sidang-sidang berikutnya, anjuran pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi acara permusyawaratan. Dan terbukti, setelah beberapa kali mengadakan pembahasan atau pandangan umum disusul dengan penjelasan atau jawaban dari pemerintah, maka kurang lebih dua bulan berikutnya, konstituante sudah dapat mengakhiri permusyawaratannya melalui pemungutan suara.²⁴

Hasil pemungutan suara diadakan sampai tiga kali, membuktikan bahwa usul anjuran pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diterima oleh konstituante,
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 karena tidak memenuhi persyaratan konstitusional. Jumlah yang menyetujui usul atau anjuran pemerintah itu tidak mencapai dua pertiga dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. Padahal menurut UUDS 1950, keputusan itu dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota sidang konstituante.

²³ J.C.T. Simorangkir S.H, 1984, Hal. 105-106

²⁴ *Ibid*, 1984, Hal. 106

Karena konstituante sudah dianggap tidak mungkin lagi dapat menyelesaikan tugasnya, maka pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan Dekrit untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 WIB (05.00 sore) Presiden tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan Dekrit yang menyatakan bahwa terhitung mulai dari hari penetapan Dekrit UUD Proklamasi dan Revolusi kita berlaku lagi bagi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan bahwa UUD RIS 1950 tidak berlaku lagi.

Dekrit itu dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada hari Ahad pukul 17.00 WIB di sepan istana Merdeka Jakarta.²⁵ Adapun teks Dekrit tersebut selengkapnya berbunyi :

²⁵ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Jakarta : rajawali Presiden, 1986), Hal. 124

**DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA /
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
TENTANG
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Degan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa :

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA / PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG**

Menetapkan pembubaran konstituante :

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan ini dan, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta ,
Pada tanggal 5 Juli 1959.

Atas nama rakyat Indonesia
Presiden Republik Indonesia / Panglima
Tertinggi Angkatan Perang.

SOEKARNO ²⁶

Dengan adanya Dekrit itu kedudukan Pancasila semakin

²⁶ Endang Saifuddin Anshari, 1986, Hal. 124-126

kokoh. Sebagai dasar negara maka semakin kokoh pula kedudukan Presiden Soekarno dalam memutar roda politik Demokrasi Terpimpin.

Dengan dibubarkannya Majelis Konstituante dan dihapusnya UUDS 1950 diganti dengan Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 5 juli 1959 itu, maka berakhirilah Demokrasi Parlementer dan mulailah Era Demokrasi Terpimpin ciptaan Presiden Soekarno.²⁷

Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 adalah :

1. Bahwa anjuran presiden dan pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tidak memperoleh keputusan dari konstituante.
2. Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota konstituante untuk tidak lagi menghadiri sidang, maka konstituante tidak mungkin lagi

²⁷ Syafii Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Cet. I, 1988), Hal. 142

menyelesaikan tugasnya yang dipercayakan oleh rakyat

kepadanya.

3. Bahwa keadaan demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan kesatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

4. Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan presiden sendiri, kepala negara terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara Proklamasi.

5. Bahwa Presiden berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.²⁸

Akhirnya Dekrit Presiden tersebut dinyatakan sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia yang menguraikan tentang

²⁸ Moh. Kusnadi, Bintan Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta, yayasan Proklamasi, CSIS, 1981), Hal. 174

lima kebijaksanaan, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan kepribadian Indonesia. Penjabaran dari Manifesto politik kemudian dikenal dengan Manipolo USDEK.²⁹

A. Faktor Kegagalan Konstituante

Sejarah konstituante Bandung membuktikan, bahwa sidang pembuat Undang-Undang Dasar itu tidak berhasil bersama-sama pemerintah menetapkan suatu Undang-Undang Dasar yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Baik dengan konsep Undang-Undang Dasar , maupun dengan adanya konsep Undang-Undang Dasar dari pemerintah berupa UUD 1945.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Namun menurut pendapat J.C.T. Simorangkir adalah kurang fair serta kurang sesuai dengan kenyataan apabila dikatakan, bahwa Konstituante bandung itu gagal total. Memang badan ini tidak menghasilkan sesuatu Undang-Undang Dasar, tetapi karya-karyanya di bidang konstitusi merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal

²⁹ AMW. Pranaka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, (Jakarta : Yayasan Proklamasi, CSIS, 1981), Hal. 174

oleh siapapun.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Statemen di atas dipertegas lagi oleh Prof. A.Kahar Muzakkar

dari fraksi Masyumi, Dalam pidatonya di depan sidang Majelis Konstituante pada tanggal 11 Mei 1959, ia memberikan keterangan tentang hasil final Majelis Konstituante :

“Saya mempunyai pengalaman pada biasanya ketua Konstituante kita Mereka. Wilopo itu adalah orang yang benar dalam perasaannya. Pada hari penutupan panitia persiapan konstitusi (tanggal 18 Pebruari 1959) yang lalu, saya perhatikan dari kata-kata penutupan sidang panitia persiapan konstitusi hari itu, dengan jelas beliau mengatakan bahwa konstitusi sudah dapat menyelesaikan 90 % dari tugasnya”.³⁰

Dari rangkaian data yang telah dirangkaikan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa : Tidaklah beralasan kesimpulan yang menyatakan bahwa Majelis Konstituante “tidak menghasilkan sesuatupun yang bermakna”, atau” tanpa hasil kongkrit sedikitpun” ataupun kesimpulan yang lain yang sejiwa dan semakna dengan itu yang sering dilansir oleh semntar orang. Majelis ini-dengan meminjam kata-kata Mr. Wilopo, ketua umumnya sendiri-edah dapat menyelesaikan 90% dari tugasnya. Dan seandainya majlis ini diberi

³⁰ Endang Saifuddin Anshari, 1986, Hal. 98

kesempatan yang fair dalam masa beberapa bulan lagi saja, tanpa intervensi dari luar, niscaya majlis ini dapat melaksanakan 100% dari tugasnya, dapat berhasil menyelesaikan problem-problemnya dengan tuntas, dan merampungkan tugasnya yang mulia yang dipercayakan segenap rakyat Indonsia pada pundaknya untuk membentuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang permanen dan diterima bulat setulus hati serta didukung Departemen Agama RI dijunjung oleh segenap kelompok yang hidup dalam msyarakat Indonesia.³¹

Menurut faktanya memang tidak ada kesepakatan diantara para anggota konstituante mengenai Dasar Negara, sebab di dalam majlis konstituante itu diperdebatkan tiga macam Dasar Negara, yakni:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I. yang mempertahankan SOSIAL-EKONOMI sebagai Daras

Negara

II. yang mempertahankan ISLAM sebagai Dasar Negara.

III. Yang mempertahankan PANCASILA sebagai Dasar Negara .

³¹ Endang Saifuddin Ansari, hal. 99

Namun golongan yang mempertahankan PANCASILA sebagai Dasar Negara adalah mayoritas, walaupun tidak sampai dua pertiga jumlah anggota sidang konstituante.³²

Jadi sekalipun konstituante tidak berhasil untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Sementara 1950, namun pengaruh konstituante, melalui golongan yang menerima dan mempertahankan PANCAILA sebagai Dasar Negara. Adalah cukup besar dan bahkan menentukan bagi berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan kata lain : Pengaruh Konstituante, sekalipun "gagal" (dalam arti tidak berhasil menetapkan UUD) adalah cukup besar bagi penetapan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Adanya perdebatan serta perbedaan pendapat para anggota Konstituante yang tajam, mendalam dan bahkan kontroversial, khususnya waktu permusyawaratan mengenai dasar negara kemudian

³² J.C.T. Simorangkir, hal. 112

ketika memperdebatkan anjuran pemerintah untuk kembali ke UUD 1945, jauh hari setelah diramalkan oleh anggota M. Yamin.

Pada tanggal 23 Nopember 1956, yakni pada saat sesudah terpilih pimpinan Konstituante, dan sidang akan pembicaraan mengenai Peraturan Tata Tertib Konstituante, M.Yamin pernah berkata:

“... mereka raba rasa saya. Akan datang waktunya, bahwa suasana dalam Konstituante ini tidak akan tetap teduh dan tenang belaka, melainkan dapat dirasakan di dalam gedung Konstituante ini akan bertiup taufan dan badai idiolog sekuat baja ...”.³⁴

Juga Prof. Dari. Ismail Suny S.H. dalam bukunya :Pergeseran Kekuasaan Eksekutif” Berkata “senada” dengan M. Yamin: “Konstituante telah menjadi medan perdebatan yang tidak berkesudahan, pertarungan bagi partai-partai dan pimpinan-pimpinan politik mengenai persoalan-persoalan prinsipal”.³⁵

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan Konstituante dalam menetapkan UD adalah sebagai berikut:

³³ J.C.T. Simorangkir, hal. 108

³⁴ Ibid. hal. 112

³⁵ Ibid. hal. 113

1. Adanya tiga aliran ideologi yang tidak bisa

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
dikompromikan dalam sidang Konstituante.

2. Karena adanya intervensi dari luar Majelis Konstituante (Presiden Soekarno), yang berupa anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Padahal saat itu telah dilangsungkan sidang Konstituante.

3. Karena sebagian anggota-anggota Konstituante tidak lagi menghadiri sidang, maka Konstituante tidak mungkin lagi dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan rakyat kepadanya.[]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Pengertian Demokrasi Terpimpin

Sebelum memasuki pembahasan tentang pengertian Demokrasi Terpimpin, ada baiknya penulis jelaskan sedikit uraian tentang definisi demokrasi.

Demokrasi ditinjau dari segi bahasa, berasal dari bahasa Yunani, *Demos* berarti rakyat dan *Kratia* yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan kepentingan bersama. Dengan pengakuan terhadap hak-hak rakyat, pemerintahan demokrasi dapat disebut pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama.¹

¹ *Ensiklopedi Nasional Indonesia IV*, (Jakarta : PT. Cipta Adi Pusaka, 1989), Hal. 243

Bila ditinjau dari segi istilah demokrasi adalah sistim pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.²

Sementara yang lain mengatakan "*Demokrasi*" berasal dari bahasa Belanda : *Demokratie* yang berarti suatu sistim pemerintahan yang mengutamakan pengaruh rakyat dari negara itu.³

Pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi di sini adalah suatu sistim pemerintahan di mana rakyat ikut berperan di menentukan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dengan istilah lainnya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat.

Setelah penulis uraikan tentang arti demokrasi, maka selanjutnya kita ajkan membahas tentang pengertian Demokrasi Terpimpin.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam penegasan judul, bahwa arti Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistim

² *Ensiklopedi Indonesia Demiliterisasi*, (Yayasan Kanisius, 1973), Hal. 784

³ Yulius S.et. al. *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Usaha Nasional, Cet. 1984), Hal. 44

demokrasi yang dijalankan dengan rancangan dan petunjuk-petunjuk yang tertentu. Yang ketetapannya diatur dalam ketetapan MPRS Nomer VII/MPRS/1965.⁴

Demokrasi Terpimpin dimaksudkan untuk menentang sifat-sifat liberal dari pada Demokrasi Barat, yang bertentangan dengan asas-asas permusyawaratan untuk mencapai mufakat, sesuai dengan Pancasila. Dalam pelaksanaannya Demokrasi Terpimpin terlalu menonjolkan unsur pimpinan yang diberi hak untuk mengambil keputusan apabila tidak dicapai mufakat dfl suatu permusyawaratan. Maka dari itu akhirnya meluncur ke arah kediktatoran.⁵

Dalam amanatnya pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan penjelasan mengenai definisi Demokrasi Terpimpin, di antaranya adalah :

- a. Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistim demokrasi yang dijalankan dengan rancanagn dan petunjuk-petunjuk tertentu yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dl permusyawaratan / perwakilan, atau tanpa otokrasinya diktator, yang berprinsip bahwa :

⁴ WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* .

⁵ *Ensiklopedi Umum*, (Jakarta : Yayasan Kanisius, 1973), Hal.301

1. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa dan negara.⁶

b. Demokrasi Terpimpin adalah penjabaran dari sila keempat dari Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong-royong di antara sesama kekuatan nasional progressif revolusioner yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yaitu tata-cara di mengatur dan memimpin segala segi kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya masyarakat adil dan makmur serta menuju kelancaran jalannya revolusi.⁷

c. Demokrasi Terpimpin adalah satu-satunya alat untuk mengemban amanat penderitaan rakyat dan tujuan revolusi nasional Indonesia berdasarkan Pancasila, masyarakat tanpa penghisapan atas

⁶ Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta : LP3ES, 1985), Hal. 183

⁷ Muhono, *Himpunan Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara Yang Penting Bagi agkatan Bersenjata 1966*, Hal. 1459

manusia oleh manusia.⁸ Sebab Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi dengan adanya pimpinan bukan pimpinan untuk menghilangkan demokrasi, akan tetapi untuk melawan sifat-sifat liberalnya dari pada demokrasi.⁹

d. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkhi liberalisme, tanpa otokrasinya diktator. Yang dimaksudkan demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang "mendasarkan sistim pemerintahannya kpd musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang sesepuh, yang tidak mendiktatori, tetapi memimpin, mengayomi."¹⁰

Demokrasi Terpimpin sebagai landasan untuk menjalankan amanat penderitaan rakyat, sudah barang tentu kalau ia mempunyai asas, tujuan dan ciri khas tersendiri yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

Azas :

1. Demokrasi Terpimpin dipimpin oleh Pancasila, baik ideologi maupun cara kerja.

⁸ *Ibid*, Hal. 1459

⁹ Soeparno SH. Dkk, *Civics, Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1962), Hal. 84

¹⁰ Syafi'i Ma'arif, 1985, Hal. 183-184

2. Demokrasi Terpimpin menjamin kebebasan berfikir dan berbicara, mengemukakan pendapat dalam setiap permusyawaratan, dalam batas-batas keselamatan negara, kepentingan rakyat banyak, dan bertanggung jawab kepada Tuhan.

Tujuan :

1. Demokrasi Terpimpin bertujuan melaksanakan haluan negara Manipol / Usdek untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila, yang penuh kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

2. Demokrasi Terpimpin bertujuan pula untuk melindungi dan menambahkan hak-hak bagi rakyat dan menghapuskan hak hak kaum imperialis, kaum feodalis serta kaki tangan kaum kontra revolusioner, kaum anti progressif dan kaum penghisap rakyat.

Fungsi :

1. Demokrasi Terpimpin adalah alat rakyat untuk mencapai tujuan rakyat yang telah dikorbankan oleh rakyat berpuluh-puluh tahun, yaitu negara kuat, masyarakat adil dan makmur.
2. Demokrasi Terpimpin pada hakekatnya adalah demokrasi penyelenggara atau demokrasi kerja.
3. Demokrasi Terpimpin merupakan alat untuk melaksanakan konsepsi-konsepsi Bung Karno (Soekarno) sebagai penyambung lidah rakyat, termasuk konsepsi yang dicetuskan pada tanggal 21 Pebruari 1957.

Ciri Khas :

1. Demokrasi Terpimpin tidak bertentangan dengan demokrasi liberal, dan bukan diktator, tetapi adalah Demokrasi gotong royong dari semua golongan yang mendukung revolusi Indonesia, menentang kapitalisme, Imperialisme, Feodalisme dan kolonialisme.
2. Demokrasi terpimpin bukan medan pertentangan antara komponen satu sama lain, tetapi medan untuk mencari kemenangan satu golongan atas golongan yang lain, dan untuk merebut kekuasaan oleh satu golongan terhadap yang lain.

3. Demokrasi terpimpin mencari sintesa, mencari akumulasi pikiran, tenaga untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat.

4. Demokrasi terpimpin melarang propaganda anti Nasionalisme, anti agama dan anti komunisme, tetapi sebaliknya menghendaki konsultasi sesama aliran progresif revolusioner.¹¹

Sesuai makna yang terkandung di atas, maka sudah seharusnya kalau demokrasi Terpimpin itu mengakui adanya pimpinan, mengakui kebebasan berpikir, berbicara selama dalam bataskemaslahatan negara dan demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. di bawah payung Demokrasi Terpimpin akan menjadi demokrasi pelaksana, demokrasi kerja yang pola kerjanya harus di sesuaikan dengan kehendak rakyat.¹²

Namun setelah Bung Karno dapat merealisasikan konsepsinya, ia berbalik dari konsepsinya sendiri, yakni dengan sistim Demokrasi Terpimpin tidak menambah terciptanya iklim persaudaraan umat yang sehat, politik yang bebas tanpa paksaan,

¹¹ Muhono, Hal. 1460

¹² Supardo SH. Dkk. Hal. 88

tapi justru pikiran yang terkunci oleh budaya keotoriteran sehingga demokrasi yang tidak sehat ini menyeret negara dan umat ke jurang kehancuran politik.

B. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Keinginan Soekarno untuk menciptakan Demokrasi Terpimpin sudah tampak sejak bulan oktober 1956, pada tahun itu Presiden Soekarno sudah mulai membolak-balik konsepsinya tentang Demokrasi Terpimpin.¹³ Keinginan untuk melaksanakan konsepsinya itu tampak pula sejak adanya keputusan kabinet Juanda dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45) tanggal 19 Februari 1959.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada tanggal 2 Maret 1959 perdana menteri juanda mengucapkan keterangan pemerintah di dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengenai keputusan tersebut bahwa pemerintah yakin bahwa pertumbuhan politik sejak tahun 1945 menunjukkan kelemahan-kelemahan antara lain terlalu banyak

¹³ B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Grafiti Pers, 1983), Hal 27

partai-partai dan fraksi-fraksi dalam DPR, tidak ada stabilitas pemerintahan, dan penyelewengan dibidang sosial ekonomi sering terjadi, sehingga pemerintah yakin pula, kita harus meninggalkan sistim pemerintahan yang lama dan bangkit ke sistim yang baru.¹⁴

Atas dasar dan keyakinan itulah maka dewan menteri sampai kepada kesimpulan dan menyetujui prinsip Demokrasi Terpimpin, karena alam demokrasi liberal dipandang sudah tidak cocok dengan tuntutan zaman. Demokrasi liberal harus dibongkar dan diganti dengan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin harus dipancarkan teguh-teguh di atas demokrasi liberal.¹⁵ Demi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.¹⁶

Melaui dekrit presiden 5 Juli 1959, Bung Karno mengumumkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45) dan tidak berlakunya kembali UUDS 1950. Dan dia menandakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa ini

¹⁴ Ismail Suny, *Pergeseran Eksekutif Penyelidikan Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Aksara Baru), Hal. 192

¹⁵ Supardo Hoetaoreek SH. Dkk, *Civics, Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*, (Balai Pustaka, 1962), Hal. 84

¹⁶ Ismail Suny, Hal. 194-195

adalah masa peralihan dari sistim lama kepada sistim yang baru, dari demokrasi parlementer ke Demokrasi Terpimpin.

Secara resmi Demokrasi Terpimpin bermula dengan dikeluarkannya dekrit itu kemudian majelis Konstituante yang dibentuk pada tahun 1956 dinyatakan bubar karena ketidakmampuannya untuk merampungkan tugasnya, terutama dalam menetapkan dasar negara yaitu dasar Pancasila atau dasar Islam.

Dengan dikeluarkannya dekrit itu semua pimpinan pemerintahan dan angkatan bersenjata diserahkan kepada presiden Soekarno. Begitu juga pimpinan rakyat serta organisasi massa secara formal langsung diserahkan kepada Presiden Soekarno dan Presiden Soekarno secara langsung menjadi pimpinan semua itu. Dengan demikian kekuasaan semakin berpusat di istana negara. fungsi departemen semakin berkurang, khususnya Departemen Pertahanan Keamanan. Otanomi Presiden semakin besar, bahkan menjadi ukuran politik pada masa itu, sedang kekuatan politik lainnya menjadi lumpuh tidak berdaya, suhu politik menjadi keropos termakan oleh budaya otoriter Demokrasi Terpimpinnya Presiden Soekarno.

Tindakan-tindakan Presiden Soekarno lainnya semakin meluas, antara lain MPR hasil pemilihan umum tahun 1955 yang anggota-anggotanya adalah pilihan rakyat dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk MPRS yang diatur oleh Penetapan Presiden (Penpres) No : 2 tahun 1959, tertanggal 22 Juli 1959 yang anggotanya dipilih dan diberhentikan oleh presiden sendiri. Sejalan dengan itu dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang diatur oleh Penpres nomor : 3 tahun 1959.¹⁷

Akhir pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul *Penemuan Kembali Revolusi Kita*, oleh DPAS ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan untuk membangun sistem multi partai, maka dikeluarkanlah Penetapan Presiden (Penpres) Nomor : 7 tahun 1959, tentang penyederhanaan kepartaian, antara lain Masyumi dan PSI terkena Penpres ini. Kemudian DPR hasil pemilihan rakyat dibubarkan dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong (DPRGR) yang diatur melalui Penpres No. 4 tahun 1960. Selanjutnya diselenggarakan

¹⁷ Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul 'Ulama'* ,(Solo : Jatayu, Cet. I, 1985), Hal. 221

Kongres Pemuda Indonesia di Bandung pada bulan Februari tahun 1960 yang kemudian isinya terkenal dengan USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia).¹⁸ Kemudian oleh DPAS dijadikan Manipol USDEK.

Manipol USDEK ini disusun oleh Presiden Soekarno sebagai pedoman pelaksanaan program kerja sesuai dengan perubahan-perubahan fundamental yang telah terjadi di dalam sendi-sendi ketatanegaraan di Indonesia, dari azas dan faham liberalisme menjadi Demokrasi Terpimpin, sejak dekrit presiden 5 Juli 1959. Dengan demikian berarti Presiden Soekarno telah berhasil merebut kunci kehidupan politik sehingga dengan mudahnya ia membelok-belokkan gagasan-gagasannya dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui ungkapan-ungkapan yang sloganistik revolusioner yang berporoskan NASAKOM ini diwujudkan dalam seluruh jaringan lembaga lainnya.¹⁹

Tujuan adanya NASAKOM tersebut adalah untuk mempersatukan bangsa Indonesia, dan keinginan Soekarno untuk

¹⁸ *ibid.* Hal.

¹⁹ Chairul Anam, 1985. Hal.222

mempersatukan bangsa Indonesia baik di kalangan nasionalis, agama maupun komunis / Marxisme ini sudah dimulai sejak zaman pergerakan Indonesia.²⁰ Yaitu perstuan Islamisme, Nasionalisme, Marxisme itu telah dicetuskan sejak tahun 1926.²¹ Namun keinginan itu baru terrealisir setelah ia dapat memegang seluruh jaringan kekuasaan dengan sisitim Demokrasi Terpimpin.

Konsep NASAKOM ini memang asli dari pemikirannya sendiri, bahwa ide mempersatukan bangsa Indonesia dalam bentuk NASAKOM itu tidak terlepas dari kepribadiannya sendiri, sebagaimana ia pernah mengatakan :

"Saya ini orang campuran, ya Theis, ya Nasionalis, ya percaya kepada Tuhan, ya cinta kepada Tanah Air, ya cinta kepada nasionalisme, oleh sebab itu saya yakin NASAKOM merupakan proses persatuan Indonesia"²²

Begitulah tekad bulat Soekarno demi terealisasinya konsepsi NASAKOM. Dan pada waktu itu tidak ada satupun partai politik yang berani menghalangi kehendaknya, sebab resikonya terlalu

²⁰ A.Z. Abidin Baharuddin, *Bahaya Komunis*, (Jakarta : Bulan Bintang, Cet. III, 1982) Hal. 80

²¹ Chairul Anam, 1985, Hal. 222

²² Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi I*, (Jakarta : Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1964), Hal.

besar, karena pasti akan ditindak oleh Presiden Soekarno. Kondisi yang demikian inilah yang menurut pengamatan Ibrahim T. Alfian yang membuat partai-partai politik menjadi lumpuh, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), disamping Presiden Soekarno sendiri sebagai pemegang kunci kekuasaan dan keseimbangan di antara kedua kekuatan.

Perwira Militer. Khususnya Angkatan Darat (AD), terkenal anti PKI. Sikap anti Komunis dari militer ini terlihat dalam menghalang-halangi PKI masuk dalam kabinet.

Tindakan ABRI menolak PKI masuk dalam kabinet itu sangat memukul perasaan Presiden Soekarno yang sejak lama menginginkan persatuan nasional dengan slogan NASAKOM. Sikap berlawanan ide Soekarno itu mengakibatkan kerenggangan hubungan antara militer dengan Presiden Soekarno. Ketidak senangan ABRI terhadap PKI ini dianggap oleh Soekarno sebagai *Komunisto Phoby* dari sikap pemimpin militer.²³

²³ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia, 1990), Hal. 42

Dan kerenggangan hubungan antara Soekarno dengan ABRI ini oleh PKI benar-benar dimanfaatkan, sehingga jadilah tingkah laku politik Soekarno lebih banyak diberikan kepada PKI.

Apalagi kalau ide-ide PKI yang dilontarkan senantiasa sejalan dengan ide Presiden Soekarno, sebagaimana ide me-NASAKOM-kan pimpinan militer. Tentu saja hal merupakan kesempatan emas bagi PKI dalam rangka merangkul Bung Karno. Dengan demikian PKI semakin keras dalam berusaha memasukkan pengaruhnya ke tubuh ABRI, dan usaha ini berhasil menyusup ke tubuh Angkatan Udara (AU) dan KKO (sekarang, Angkatan Laut) pada saat itu.²⁴

Usaha yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dalam hal pembelaan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan gagasan NASAKOM sungguh luar biasa, terutama ketika pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu pada tahun 1955 yang diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong (DPRGR), itu merupakan kebijakan Soekarno dalam rangka memasukkan PKI dalam kabinet. Meskipun hal ini ditentang oleh para pemimpin partai-partai politik, khususnya partai agama Seperti partai NU (Nahdlatul

²⁴ Alfian, 1990, Hal. 43

'Ulama') dengan perantara Rois 'Aam K.H. Wahab Hasbullah, Partai Katholik dengan perantara Kasino yang sama-sama menentang masuknya Komunis dalam kabinet dan menolak kerjasama dengan mereka.²⁵

Di samping itu juga timbul reaksi dari kalangan Partai Nasionalis Indonesia (PNI), bahwa anggota partai mereka yang duduk dalam DPRGR bukanlah wakil dari PNI ; hubungan antara mereka dengan PNI sudah tidak ada lagi, sebab yang duduk dalam DPRGR adalah atas hasil penunjukkan.²⁶

Reaksi juga timbul dari Prawoto Mangkusasmita (Masyumi) dan Sutomo (Bung Tomo) dari Partai Rakyat Indonesia (PRI). Bung Tomo mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 22 Juni 1960 dan ditujukan kepada kabinet Soekarno, yaitu :

" Mengadukan kabinet yang dipimpin oleh Dari. Ir. Soekarno atas pelanggaran yang dilakukan kabinet tersebut atas Undang-Undang Dasar negara kesatuan Republik Indonesia 1945 dengan tindakan-tindakan kabinet membubarkan

²⁵ S.M. Amin, *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), Hal. 204

²⁶ Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), Hal. 314

patlemen Republik Indonesia hasil pilihan
rakyat,.....”²⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selanjutnya Sutomo menuduh, bahwa kabinet bertindak sewenang-wenang dengan mengemukakan beberapa fakta sebagai berikut :

- a. Paksaan untuk menerima Manipol USDEK tanpa diberi tempo terlebih dahulu untuk mempelajarinya.
- b. Paksaan supaya diadakan kerjasama antara golongan Nasionalisme, Agama dan Komunis
- c. Paksaan pembongkaran tugu gedung proklamasi pegangsaan Timur 56 Jakarta.²⁸

Sebuah lembaga yang diberi nama “*Liga Demokrasi*”
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
dibentuk untuk menentang kebijakan Soekarno yang memperlemah peranan parlemen. Dalam sebuah pernyataannya yang di tanda tangani oleh lima tokoh IPKI dan sepuluh tokoh politik dari Masyumi, Nahdlatul 'Ulama', Partai katholik dan Partai Protestan serta PSI, lembaga ini menuntut agar pembentukan Parlemen

²⁷ *ibid*, Hal. 315

²⁸ *ibid*, Hal. 315

Gotong-Royong menurut garis yang direncanakan pemerintah ditanggungkan untuk mencari cara-cara yang demokratis dan Konstitusional buat membentuk parlemen yang demokratis.²⁹

Pada kesempatan lain, pada bulan Maret 1960, Liga Demokrasi juga mengeluarkan pernyataan, yang isinya adalah menentang kebijakan Presiden Soekarno yang mengangkat parlemen baru yang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR GR) dari tokoh-tokoh yang dekat dengannya dan mendukung konsepsi-konsepsinya. Pernyataan Liga Demokrasi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan perimbangan perwakilan golongan dalam DPR GR, memperkuat pengaruh dan kedudukan dari pada suatu golongan tertentu yang mengakibatkan kegelisahan-kegelisahan dalam masyarakat dan memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat yang demikian, pada hakekatnya adalah DPR yang meng-iya-kan saja, sehingga tidak bisa menjadi soko guru negara hukum yang diinginkan.

²⁹ Dari. Nasaruddin Syamsuddin, *Soekarno , Pemikiran dan Kenyataan Praktek*, (PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1993), hal. 195

c. Pembaruan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang disiapkan itu adalah bertentangan dengan azas-azas demokrasi.³⁰

Menanggapi pernyataan Liga Demokrasi tersebut, Soekarno memukul balik kelompok pendukung Liga Demokrasi sebagai tidak demokratis, sebagai orang-orang yang mendorong pemberontakan untuk mencapai tujuan mereka dengan kekuatan senjata, dan sebuah kelompok orang-orang fasis. Dalam jawaban atas kritikan Soekarno tersebut, Liga Demokrasi lebih melihat bahwa pembentukan parlemen Gotong-Royong dinilai sebagai usaha untuk memberi dorongan kepada PKI. Hal ini bagi Soekarno, kecaman terhadap PKI dianggap sebagai perbuatan pengkhianatan, sebagai "*Komunisto phoby*", "*Kontra Revolusioner*" dan tidak sesuai dengan Manipol USDEK.³¹

Dalam rapat para penguasa perang, 12 September 1960 dibahas masalah yang berhubungan sekitar kedudukan PKI. Soekarno pada kesempatan itu, membela PKI sebagai sebuah partai yang terhormat dan patriotik dan yang dapat memberikan sumbangan

³⁰ S.M. Amin, 1967, Hal. 206

³¹ Dr. Nasaruddin Syamsuddin, 1983, Hal. 196

banyak kepada revolusi. Pada akhirnya Liga Demokrasi dilarang berdiri, dan pada tanggal 27 Februari 1961 organisasi ini pun resmi dibubarkan.

Keinginan Soekarno agar PKI dapat ikut serta dalam pemerintahan baru terlaksana pada tahun 1962. Dua orang tokoh PKI memang akhirnya menjadi menteri, tetapi ini berupa kedudukan "ex officio", karena mereka menjadi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Kedua Orang itu adalah D.N. Aidit (Sekretaris Jendral PKI, wakil ketua MPRS) dan Lukman (wakil Sekretaris Jendral PKI, wakil ketua DPRGR).³² Sebaliknya Masyumi tidak serta dalam DPRGR. Parta ini benar-benar diabaikan, malah kemudian ia harus membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam pemberontakan PRRI-Permesta. Dan apabila Masyumi gagal dalam membuktikan kalau ia tidak terlibat pemberontakan, maka Masyumi tidak mempunyai hak hidup lagi sebagai sebuah partai politik dimata Soekarno. Dan memang akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1960 masyumi diperintahkan untuk bubar oleh Presiden Soekarno.³³ Maka pada tanggal 13

³² Ibid, hal. 196

³³ Deliar Noer, *Partai Islam di pentas Nasional*. (Jakarta : Grafitti pers, Cet. I, 1987), Hal 367

September 1960, pimpinan pusat Masyumi menyatakan partainya
bubar

Ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1960 dapat dikatakan sebagai tonggak dalam perkembangan Demokrasi Terpimpin. Dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno mengemukakan perlunya dibentuk Dewan Pertimbangan Agung, Badan Perancang Nasional, Badan Pengawas Penertiban Aparatur Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Front Nasional. Dari lembaga-lembaga yang dibentuk itu hanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lah yang bersifat konstitusional, karena terdapat dalam UUD 1945. Semua ketimpangan itu mungkin terjadi sebab pada periode Demokrasi Terpimpin ini semua hal tergantung kepada keinginan presiden.[]

BAB IV

PERCATURAN PARTAI POLITIK ISLAM DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Persepsi Umat Islam Terhadap Demokrasi Terpimpin

Sebelum penulis menganalisa lebih jauh perbedaan persepsi umat Islam terhadap ide dan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, lebih dahulu perlu menengok apa hakekat dan karakteristik demokrasi yang dikatakan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu. Dengan mengetahui apa Demokrasi Terpimpin itu serta bagaimana pelaksanaannya, kita akan dapat menyimpulkan bahwa sistem ini bukanlah demokrasi sebagaimana yang diminta oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

Sejak terlaksananya Dekrit Presiden Soekarno tertanggal 5 Juli 1959, berarti Indonesia sudah tidak lagi menganut Demokrasi Liberal, tetapi berganti dengan Demokrasi Terpimpin. Dengan demokrasi ini, menurut Soekarno masyarakat Indonesia akan aman dan tenteram karena sudah sesuai dengan kepribadian dan jiwa revolusi Indonesia. Namun ironinya, setelah dekrit itu tindakan-

revolusi Indonesia. Namun ironinya, setelah dekrit itu tindakan-tindakan Presiden Soekarno semakin banyak yang menyimpang dari UUD 1945.

Di dalam menghadapi Demokrasi Terpimpin, partai-partai politik Islam terdapat perbedaan visi dan persepsi antar satu sama lainnya. Tetapi pada garis besarnya ada dua kelompok partai Islam pada masa itu. Kelompok *Pertama*, Masyumi memandang bahwa ikut serta dalam suatu sistem politik otoriter sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Sedangkan bagi kelompok *Kedua*, Liga Muslim yang terdiri dari NU, PSII dan Perti turut serta dalam sistim Demokrasi Terpimpin adalah sikap realistik dan pragmatik. K.H. Syaifuddin Zuhri (NU) misalnya membawakan dalil pesantren sebagai pembedaan mengapa NU turut dalam sistem yang diciptakan Soekarno itu : *Maalaa yudraku kulluhu laa yudraku ba'dhuhu*", apa yang tidak dapat diraih 100 %, sebagian yang dapat diraih janganlah dilepaskan.¹

Berpegang pada prinsip yang diajarkan di pesantren ini, maka NU memutuskan untuk masuk dalam sistem Demokrasi Terpimpin,

¹ Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), Hal. 57

betapapun kecil keuntungan yang mungkin diraih. Masyumi sebaliknya, berpendirian bahwa masalahnya bukan terletak pada masalah untung 100 % atau kurang dari itu. Di mata Masyumi sistem Demokrasi Terpimpin akan membawa bencana bagi bangsa dan negara. Oleh sebab itu, *move* Soekarno harus dilawan, apapun akibatnya.

Masyumi sebagai cagar demokrasi tampaknya tidak punya pilihan lain kecuali menghadapi Soekarno dan sistemnya, sekalipun dengan kekuatan yang tidak seimbang. Sementara itu PKI yang angat lihai dalam memanipulasi politik pada waktu itu berpihak sepenuhnya kepada sistem Soekarno. Dan semua orang pun tahu bahwa salah satu tujuan dari taktik PKI ini adalah untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya dan lawan politiknya yang terbesar adalah Masyumi.

Sementara PSII sebagai partai tertua dan paling berpengalaman tidak pernah diperhitungkan lagi secara serius oleh lawan-lawannya. Karena PSII banyak mengalami trauma politik, disamping partai ini telah menjadi kecil, pada masa Demokrasi Terpimpin ini gaya politiknya hanyalah menyesuaikan diri dengan

gaya politiknya NU.² Dan apalagi diharapkan pendapat lain dari pihak Perti, itu tidak mungkin.

Pada bab II sudah penulis singgung tentang pembubaran majlis konstituante pada 5 Juli 1959. Setelah demokrasi Terpimpin berjalan sekitar sembilan bulan, Sukarno membubarkan parlemen hasil pemilihan umum 1955 itu pada 20 maret 1960. Kemudian ia membentuk DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), di mana Masyumi dan PSI tidak diikut sertakan. Sebagai partai yang dikategorikan sebagai pengetahuan halang revolusi, Masyumi memang tidak sesuai dimasukkan dalam DPRGR, Apalagi Masyumi dituduh sebagai partai yang turut mendalangi pemberontakan PRRI-permesta, sekalipun secara hukum tuduhan ini tidak beralasan.

Adapun persepsi Nahdlatul 'Ulama' tentang penerimaan eksistensi DPRGR, adalah dalam rangka menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar (memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang mungkar). Dalam arti praktis yang dituju N U adalah bertambahnya jumlah wakil umat Islam dalam DPRGR. Ironisnya bila orang meneliti dengan cermat komposisi DPRGR, maka wakil golongan islam bukanya bertambah seperti dikatakan N U, tetapi berkurang 48

² Syafi'i Ma'arif, 1988, Hal. 58-59

kursi bila dibandingkan dengan kekuatan mereka dalam DPR pilihan rakyat sebanyak 115. Dalam DPRGR kursi mereka hanyalah 67, Nasionalis Sekuler 94 kursi, Komunis 81 kursi. Dan kursi-kursi yang tersisa adalah untuk mewakili golongan kepentingan dan lain-lain.³

NU memang dengan antusias memasuki DPRGR. Sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Ma'arif dalam surat kabar Duta Masyarakat melukiskan bahwa betapa seronoknya sidang Dewan Partai untuk menerima kehadiran DPRGR. Duta Masyarakat menulis : "wajah-wajah baik pimpinan Partai maupun para anggota Dewan Partai jernih-jernih semuanya".⁴

Sidang Dewan Partai Nahdlatul 'Ulama' yang berlangsung mulai tanggal 24 - 27 April 1960. Pada tanggal 27 April Duta Masyarakat menurunkan tajuknya dengan judul "Kepribadian Partai". Dalam tajuk ini digambarkan bahwa posisi politik Nahdlatul 'Ulama' penting sekali. Berikut isi tajuk itu :

Pada saat inilah yang sejitu-jitunya Partai NU, dimana Dewan Partai sedang bersidang di Jakarta, untuk kembali kepada kepribadiannya yang asli, pribadi yang selalu menempatkan kesemua persoalan di atas satu pertimbangan yang senantiasa menghitung untung-rugi, manfa'at dan tidak manfa'at...

³ Syafi'i Ma'arif, 1988 Hal. 62.

⁴ *Ibid*, Hal. 62.

NU sedang bermain sebagai sebagai pelaku utama, sebagaimana banyak kalangan yang merindukan untuk tampil menjadi pelaku utama pula. Proses mencari kekuatan !

Kewajiban warga NU adalah menjaga kekuatan yang ada ini, itu saja.⁵

“Kembali kepada pribadi yang asli” di mata NU ialah berupa pertimbangan untung rugi, manfaat dan tidak manfaat dalam menghadapi fluktuasi politik. Tegasnya mendukung Demokrasi Terpimpin dengan DPRGRnya dipandang menguntungkan dan memberi manfaat kepada NU. Dan NU pada masa permulaan periode demokrasi terpimpin merasa sudah tampil sebagai pelaku utama dalam menentukan jalannya negara, sebagaimana penjelasan Duta Masyarakat tersebut. Akan tetapi Syafi’i Ma’arif berpendapat bahwa pemain utama selama era demokrasi terpimpin adalah Sukarno, Angkatan Bersenjata, dan PKI, bukan golongan Islam. Golongan Islam hanyalah meramalkan jargon NASAKOM (Nasional, Agama, dan Komunis), suatu bentuk kerja sama semu dan dipaksakan.⁶

Namun demikian sekalipun jumlah NU menempati posisi paling besar, partai NU masih berada dalam posisi defensif, NU

⁵ Syafi’i Ma’arif, 1988, Hal. 63.

⁶ *Ibid*, Hal. 64.

tetap tidak mempunyai keberanian untuk melahirkan pendiriannya karena takut oleh Bung Karno dan dibubarkan.

Akan tetapi lama-kelamaan arah Revolusi Indonesia semakin condong ke RRT Departemen Agama RI dan negara-negara sosialis atau komunis lainnya, dan sejak saat itu gagasan Bung Karno mulai tampak berbau komunis.⁷ Garis-garis politik Indonesia ditarik dengan garis RRT. Dan sebagai puncak dari paralelisasi luar negeri Indonesia dengan luar negeri RRT ini adalah diciptakannya poros Jakarta, Peking, Phnompen sebagai poros anti Imperialisme dan kemudian penarikan keanggotaan Indonesia dari PBB. Sedangkan politik dalam negeri Bung Karno memusatkan seluruh jaringan kekuasaan dalam genggamannya, dengan terlebih dahulu mengeluarkan doktrin "RESOPIM". Peluang-peluang politik banyak diberikan pada PKI sehingga PKI semakin berani dan kurang ajar, ia mengadakan demonstrasi liar, dengan mempertajam hubungan Indonesia dengan Barat, kemudian aksi-aksi sepihak di bidang agraria dilakukan penyerobotan tanah dan pembabatan hutan-hutan

⁷ Chalid Mawardi, *Practica Politica Nahdlatul 'Ulama*, jilid I, Jakarta, Yayasan Pendidikan, tt., Hal. 37.

secara liar, dan kalau ada yang menentang aksi-aksi PKI akan dicap sebagai komunisme phobi dan kontra revolusi.

Tindakan selanjutnya agar PKI segera dapat mewujudkan cita-citanya, maka dibentuklah angkatan bersenjata baru yang terdiri dari buruh tani (BT) agar jaringan politiknya bertambah kuat dari pada lainnya. Namun usaha ini mendapat tantangan dari pihak Angkatan Darat dan sebagai usaha untuk mengimbangi rencana pembentukan angkatan kelima itu termasuk Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan (Menko Hankam) segera membentuk Pertahanan Sipil (Hansip) dan Resimen-resimen Mahasiswa.

Setelah eksistensi Nahdlatul 'Ulama dan beberapa bulan sebelum itu terjadi pemusatan politik "Poros Jakarta-Peking" yang menyebabkan arah politik condong ke kiri, maka segera NU mengadakan konsolidasi organisasi, NU sudah melihat tindakan-tindakan politik semakin berani dan keras, sehingga perlu dihadang di segala bidang. Seperti yang dikemukakan oleh K.H. Saifudin Zuhri :

⁸ A.Z. Abidin Baharuddin Lopa, *Bahaya Komunisme*, Jakarta, Bulan Bintang, cet. III, 1982, Hal. 224.

"Perlawanan NU terhadap PKI dilakukan di semua medan juang. PKI menggerakkan massanya, NU mengorganisir pemuda Asor menjadi Banser yang lebih militan. PKI menggerakkan Lekranya, NU mengaktifkan Lesbuminya, PKI menyanyikan lagu Genjer-genjer yang penuh hasutan dan sindiran, NU mengobarkan bacaan sholawat Badar.....NU mengobarkan semangat perlawanan terhadap PKI sebagai kelanjutan peristiwa aksi PKI di Madiun pada tahun 1948".⁹

Perlawanan NU terhadap PKI dilakukan di seluruh medan juang itu tidak hanya pada forum musyawarah tetapi lebih dari itu perlawanan dilakukan secara fisik, agar konsentrasi PKI menjadi terganggu, dan tindakan NU dilaporkan pada Presiden sehingga NU mendapat peringatan keras karena NU sudah berani melawan aksi revolusioner.

Perlawanan ini terlihat jelas dengan menandinginya dalam semua aspek kehidupan. Dalam bidang kepemudaan, PKI menggalang Gerakan Offensif Pemuda, sedangkan NU membentuk

⁹Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul 'Ulama* (Solo : Jatayu, 1985), Hal. 222.

Banser Ansor. Dalam bidang perburuhan, PKI membentuk SOBSI, sedangkan NU menandinginya dengan Sarbumusi (Sarikat Buruh Muslim Indonesia). Dalam bidang pertanian, PKI menggalang para petani dalam BTI (Barisan Tani Indonesia), NU membendungnya dengan membentuk Pertanu (Persatuan Tani NU). Dalam bidang kebudayaan, PKI membentuk Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), NU membentuk Lesbumi (Lembaga Seni Budaya Muslim). Selain organisasi di atas, NU juga membentuk organisasi underbouw untuk menggalang massa, seperti IPPNU (Ikatan Pelajar-Pelajar Nahdlatul 'Ulama), Muslimat Nahdlatul 'Ulama, Pergun (Persatuan Guru Nahdlatul 'Ulama), HPMI (Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia), *Haiah Ta' mir al-Masaajid* (Perkumpulan Para Pengelola Masjid), PM II (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang memisahkan dari Nahdlatul 'Ulama tahun 1972) ISHARI (Ikatan Seni Hadrah Republik Indonesia), *Jam'iyat al-Qurro' wa al-Huffadz* (Wadah Ahli Membaca dan Penghafal al-Qur'an), Lembaga Misi Islam dan Lembaga Ma'arif.

B. Partai-Partai Politik Islam dalam Demokrasi Terpimpin

1. Masyumi

a. Sejarah Berdirinya

Bila selama ini kesatuan gerak politik di kalangan organisasi dan partai-partai politik Islam dirasakan tidak memadai sebagai wahana perjuangan, maka dipandang sudah amat mendesak agar umat Islam merapatkan barisan dalam satu partai politik. Partai politik itu adalah Masyumi, tetapi bukan Masyumi "*Made in Japan*", seperti yang dibentuk pada tahun 1943 atas "kebaikan" penguasa Jepang di Indonesia. Masyumi yang berdiri pada tanggal 7-8 Nopember tahun 1945 adalah sepenuhnya hasil karya pemimpin-pemimpin umat Islam dalam sebuah konggres yang bertempat di Gedung Madrasah Muallimin Muhammadiyah, Yogyakarta.

Di lihat dari data sosiologis umat, pendukung utama partai baru ini adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul 'Ulama, Jadi jelas secara ideologis, Masyumi adalah kelanjutan dari MIAI, tetapi kali ini mengkhususkan perjuangannya pada bidang politik, dalam rangka menegakkan ajaran Islam dalam wadah Indonesia merdeka. Selain Muhammadiyah dan Nahdlatul 'Ulama, hampir dari semua organisasi

Islam, baik lokal maupun nasional, kecuali Perti, mendukung kehadiran Masyumi ini sebagai satu-satunya partai politik Islam di Indonesia. Suatu partai politik Islam yang kemudian tampil sebagai pembela demokrasi yang tangguh dalam perubahan Republik Indonesia.

Dalam konggres yang diadakan pada bulan Nopember itu, tercatat sebagai ketua Masyumi adalah Mohammad Natsir dengan anggota-anggotanya seperti : Soekiman Wirjosendjojo, Abikusno Tjokrosujoso, A. Wahid Hasyim, Wali al-Fattah, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Paku Alam VIII dan A. Gaffar Ismail. Dan dalam Konggres ini diputuskan :

1. Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia
2. Masyumi-lah yang memperjuangkan nasib (politik) umat Islam Indonesia .

Dengan ini berarti pula bahwa eksistensi partai Islam yang lain tidak diakui lagi.

Pengurus Masyumi pada periode awal itu terdiri dari Majelis Syuro yang diketuai oleh KH. Hasyim 'Asy'ari dan pengurus badan

besar (Badan Eksekutif) yang diketuai oleh Soekiman Wirjosendjojo. Sedangkan Mohammad Roem sendiri pada periode awal ini adalah sebagai anggota pengurus besar.¹⁰

Masyumi telah merumuskan tujuan jangka panjang yang hendak diraihinya dalam perjuangan politiknya. Dalam Anggaran Dasarnya (AD) organisasi tujuan itu dirumuskan secara gamblang sebagai berikut :

“Tujuan partai adalah terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara Republik Indonesia menuju keridloaan Illahi”

Dengan rumusan tujuan ini, Masyumi melalui cara-cara dan saluran-saluran demokratis berkeinginan menciptakan suatu Indonesia yang bercorak Islam (Islami), tapi dengan memberikan kebebasan penuh kepada golongan-golongan lain untuk berbuat dan memperjuangkan aspirasi politik sesuai dengan agama dan ideologinya masing-masing. Hak bebas bagi golongan-golongan lain ini ditegaskan dalam tafsiran anggaran Dasar (AD) Partai. Dalam perjalanan sejarahnya, orang memang tidak meragukan Masyumi

¹⁰ Syafii Ma'arif, 1988, Hal. 31

dalam membela dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu pluralisme sosial budaya, sekalipun umat Islam secara kuantitatif merupakan mayoritas mutlak dari penduduk Indonesia.

Menurut A.R. Baswedan (1909-1986). Salah seorang pemimpin Masyumi yang penting dari bekas ketua dan pendiri PAI (Partai Arab Indonesia, berdiri pada tahun 1934), dengan bentuk federatif, Masyumi telah berhasil menarik hampir semua organisasi Islam Indonesia, sedangkan mereka tetap mempunyai otonomi dalam kegiatan sosio-keagamaan mereka. Tetapi menurut tokoh ini, kelemahan Masyumi juga terletak di sini, karena semangat golongan seringkali lebih dominan dalam partai ketimbang semangat persatuan. Kenyataan inilah yang seringkali menempatkan Masyumi dalam posisi yang sulit dalam menyusun suatu badan eksekutif yang kuat dan handal, kegagalan dalam mengarahkan dan menyalurkan semangat golongan yang heterogen itu kemudian telah membawa partai ini berhadapan dengan masalah-masalah interen yang serius dalam tubuhnya.

b. Kiprah Masyumi dalam Demokrasi Terpimpin

Untuk menjelaskan kiprah Masyumi dalam Demokrasi Terpimpin, dapat ditelusuri dari latar belakang sejarah timbulnya Dekrit Pers 5 Juli 1959. Di mana sikap Masyumi yang menentang ide Demokrasi Terpimpin tersebut, sementara partai Islam lainnya yakni NU, PSII dan Perti turut serta di dalamnya, yang mana semakin membuat / menempatkan partai kaum modernis itu pada posisi politik yang terpencil, khususnya pada era sesudah jatuhnya kabinet Ali-Roem-Idham pada bulan Maret 1957. Masyumi yang beraliansi dengan partai-partai kecil, seperti PSI dan partai Katholik jelas tidak bisa menolong posisi politiknya dalam DPR yang semakin melemah. Memang bisa dilihat dari cita-cita demokrasi, pilihan mereka adalah pilihan yang tepat, tapi budaya politik Indonesia yang lagi dikembangkan waktu itu adalah budaya politik yang otoriter dengan Soekarno dan pimpinan tertinggi Angkatan darat sebagai pemain-pemain utamanya. Dalam situasi seperti itu cita-cita demokrasi yang hanya didukung oleh suara minoritas dalam parlemen adalah seperti orang yang berteriak di tengah padang pasir. Tidak ada telinga yang memperdulikannya. Situasi bagi Masyumi semakin memburuk setelah akhir tahun 1957, yaitu turut sertanya beberapa tokoh

Masyumi dalam pergolakan daerah di Sumatera tengah, sekalipun barangkali dalam tujuan ingin menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sedang di 'uji-coba' oleh sementara Panglima daerah Angkatan Darat dalam usaha menentang pemerintah pusat di bawah pimpinan Soekarno dengan dukungan A.H. Nasution.

Tahun 1959 dan 1960 merupakan tahun yang menegangkan bagi masyumi. Untuk menyelamatkan anggota-anggota istimewa, partai ini memutuskan untuk melepaskan mereka dari ikatan partai. Ini disetujui bersama antara pimpinan partai dan pimpinan anggota-anggota istimewa itu dalam suatu rapat tanggal 8 Desember 1959 di Jakarta. keputusan ini merupakan suatu cara untuk menghadapi kemungkinan yang bisa terjadi terhadap Masyumi; suara-suara kemungkinan Masyumi dibubarkan memang sudah kedengaran.¹¹

Diantara anggota-anggota istimewa Masyumi antara lain Muhammadiyah dan Gasbindo. Gasbindo (Gabungan Sarikat Buruh Islam Indonesia) pada tahun 1960 dengan ketua Yusuf wibisono melepaskan diri dari Masyumi, karena secara berangsur disadari bahwa bila ia terikat dengan Masyumi, kepentingan anggotanya juga

¹¹ Deliar Noer, *Partai Politik Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta : Grafiti Pers, 1987), Hal. 373-374.

akan turut terombang ambing dengan kedudukan partai politik itu. Yusuf Wibisono merasa bahwa kepentingan buruh berbeda dengan kepentingan politik. Oleh sebab itu, ia merasa lebih tepat bagi Gasbindo untuk berdiri sendiri. Apalagi ia sendiri tidak setuju dengan kebijaksanaan Masyumi menghadapi Sukarno dan PRRI. Masyumi setuju dengan lepasnya ikatan dengan serikat buruh ini. Dan Yusuf Wibisono dapat duduk dalam DPRGR sebagai wakil dari Gasbindo.

Sementara itu Soekiman menolak pengangkatan dirinya sebagai anggota DPRGR dengan alasan yang terlihat dari penjelasan yang diberikannya yaitu untuk mempertahankan integritas pribadinya sebagai pemimpin ummat. Ungkapan Soekiman tentang "ketidak berperwiraan dan kerendahan budi" yang bakal melekat pada dirinya sekiranya pengangkatan itu diterimanya, sementara partainya Masyumi dikucilkan, adalah refleksi dari pribadi Soekiman yang punya integritas tinggi dan tahan banting.

Dengan dikeluarkannya keputusan Presiden no. 200 / 1960 yang di umumkan pada tanggal 17 Agustus 1960, pimpinan partai Masyumi menyatakan partainya bubar untuk memenuhi keputusan

presiden itu. Hilangnya Masyumi dari pelataran sejarah modern Indonesia dapat diaertikan robohnya pilar-pilar demokrasi dan rapuhnya Indonesia sebagai negara hukum yang dengan gigih diperjuangkan oleh Masyumi.

2. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

a. Sejarah berdirinya

Partai politik Perti berasal dari organisasi tradisional Islam. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Tengah. Organisasi ini didirikan di suatu pesantren terkenal di Candung dekat Bukit Tinggi, pada tanggal 20 Mei 1930.¹² Ia merupakan benteng pertahanan golongan tradisional Islam terhadap penyebaran paham dan gerakan modern. Organisasi ini didirikan oleh Syeh Abbas dari Padang Lawas, Bukit Tinggi ; Syeh Sulaiman al Rasuli dari candung dan Syeh Muhammad Djamil Djaho

¹² Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta : LP3ES, 1990),

dari Padang Panjang, Payakumbuh.¹³ Semuanya ini adalah ulama' terkenal di Minangkabau yang mempunyai surau-surau besar.

Organisasi Perti berhasil menyebarkan sayapnya ke pusat-pusat pendidikan tradisional di Jambi, Tapanuli, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan, tetapi sebelum terjadi perang, cabang-cabangnya hanya terdapat di Sumatera.

Pada masa pendudukan Jepang, Perti melanjutkan kegiatan-kegiatan pendidikan dan sosialnya, tetapi mudah dipahami bahwa jumlah anggota dan muridnya berkurang. Banyak muridnya yang pulang ke tanah kampung asalnya. Kesulitan komunikasi dan transportasi menambah semakin berkurangnya hubungan antara pusat pendidikan satu dengan yang lainnya. Pada tahun 1914 para pemimpin Perti bergabung dengan Majelis Islam Tinggi (MIT) di Bukit Tinggi, yaitu bergabung dengan suatu organisasi Islam untuk seluruh Sumatera yang diketuai oleh Syeh Muhammad Djamil Djambek, seorang 'ulama' modernis terkenal. Majelis Islam Tinggi (MIT) merupakan tempat merujuk persoalan-persoalan agama, tetapi selama perang pasifik ia kurang berfungsi dengan baik. Pada bulan

¹³ Ensiklopedi Nasional Indonesia X, (Jakarta : PARTAI. Cipta Adi Pustaka, 1990),

Desember 1945 MIT berubah bentuk menjadi partai politik digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sehubungan dengan pengumuman pemerintah Republik Indonesia di Jakarta sebelumnya agar rakyat mendirikan partai politik sebagai cermin pelaksanaan demokrasi.

Pada masa ini pula, pimpinan Perti memutuskan untuk menjadikan organisasi mereka menjadi suatu partai politik tersendiri. Keputusan ini diambil pada tanggal 22 Nopember 1945, dan diperkuat oleh kongres di Bukittinggi tanggal 22-24 Desember 1945.¹⁴

Ambisi beberapa orang pemimpin partai in ini pada tahun 1950-an berkembang menjadi ambisi pada tingkat nasional. Maka berbeda dengan kaum tradisionalis di Jawa yang pada umumnya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id teguh dalam berhadapan dengan pihak kiri, terutama komunis, Perti, terutama dalam masa Demokrasi Terpimpin, seakan sangat bersedia bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh PKI.

Mengenai keanggotaan, Perti menerima mereka yang sudah berumur 15 tahun. Ini berbeda dengan umur anggota partai-partai Islam yang lain yang memberi batasan minimum 18 tahun sejalan

¹⁴ Deliar Noer, 1987, Hal. 73,

dengan anggapan kedewasaan seseorang di Indonesia menurut peraturan. Umur yang muda ini agaknya bagi Partai dihubungkan dengan banyaknya orang yang kawin mudah di kampung-kampung. Sebab yang lain adalah pandangan yang ambivelen dari para pemimpin partai terhadap organisasi mereka, yaitu sebagai organisasi agama dan organisasi politik. Dari sudut agama, seseorang memang dianggap akil baligh bila berumur 15 tahun. Dan ini berlaku baik bagi mereka yang tradisional maupun yang modernis. Perbedaan antara organisasi agama dan politik dalam lingkungan Islam memang sering tidak dicernakan.¹⁵

Dalam perkembangannya Perti memperlihatkan kegiatan dalam hubungan dengan Madhab Syafi'i. Anggaran dasar partai pada tahun 1950 masih memungkunkan partai untuk bubar. Anggaran dasarnya tahun 1953 menekankan kelanjutan hidup partai. Partai "tidak boleh dibubarkan", partai "harus hidup dari abad ke abad" sebagai benteng pertahanan kaum Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang bermadhab Syafi'i.

Untuk keperluan kaderisasi maupun untuk menghimpun pengikut sebanyak-banyaknya, Perti menggalang para pemuda Islam

¹⁵ Deliar Noer, 1987, Hal. 75.

Indonesia, Persatuan Murid-Murid Tarbiyah Islamiyah, dan
 kepanduan Antara lain Ansor.

b. Kiprah Perti dalam Demikrasi Terpimpin

Diantara partai-partai Islam di Indonesia yang dapat bertahan, dalam Demokrasi Terpimpin salah satunya adalah Perti. Perti dapat bertahan karena sikap akomodatif terhadap Presiden Sukarno.

Setelah Perti diam beberapa lama, mungkin karena banyak pemimpin daerahnya terlibat dalam pemberontakan PRRI tahun 1958, akhirnya Perti berhasil muncul ke permukaan kancah politik dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan Demokrasi Terpimpin. Dengan penyesuaian tersebut partai ini turut tunduk dalam parlemen dan front Nasional.

Untuk diakui sebagai partai sesuai dengan Penpres 7/1959, Perti menyesuaikan anggaran dasarnya dengan persyaratan Penpres tersebut. kemudian mulai mengadakan konferensi-konferensi wilayah berturut-turut dalam beberapa propinsi. Dalam konferensi ini ketua umum Perti mengatakan bahwa organisasinya telah aktif dalam

politik sejak ia berdiri tahun 1928 menurut caranya sendiri. Ia mengemukakan bahwa Perti tidak pernah terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintah dan sebaliknya Perti telah membantu aparat pemerintahan menertibkan keamanan. Mengenai hubungan luar negeri Perti bukan tidak setuju dengan akibat mengganyang Malaysia. Ia malah menolak undangan Tengku Abdul Rahman, perdana menteri Malaysia, untuk menghadiri konferensi Islam Asia Tenggara dan Timur Jauh yang disokong oleh Muktamar Alam Islam dari Pakistan. Sirojudi Abbas ketua Perti juga sering menghadiri kongres di luar negeri yang diselenggarakan oleh organisasi atau negeri komunis. Perti juga mendesak rakyat agar setia kepada Presiden Soekarno.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Partai Syarikat Islam Indonesia.

a. Sejarah Berdirinya

Partai Syarikat Islam adalah merupakan partai tertua di Indonesia karena partai tersebut berasal dari SDI (1911) dan SI (1912). Pada mulanya partai tersebut adalah satu-satunya partai Islam di Indonesia. Sebab partai-partai tersebut didirikan kembali

adalah karena usaha formatif Amir Syarifuddin membentuk kabinet pada tahun 1974 yang ingin mengikut sertakan kalangan Islam tapi ditolak oleh Masyumi. Kalangan PSII terpancing dengan ajakan tersebut dan mereka bersedia duduk dalam kabinet yang dibentuk Amir Syarifuddin.

Pengunduran diri pemimpin-pemimpin PSII lama dari Masyumi dan usaha mereka untuk mendirikan kembali PSII itu dengan memberikan dukungan kepada Amir Syarifuddin disebabkan oleh ketidak puasan mereka dengan Masyumi. Terutama Wondoamiseno dan Arudji Kartaminata, keduanya tokoh sebelum perang, menduduki posisi kurang berarti dalam Masyumi. Mereka masuk dalam pemimpin Hizbullah dan Sabilillah yang kurang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan politik.

Alasan lain adalah anggapan bahwa pimpinan Masyumi terlalu lunak dalam menghadapi revolusi, dan oleh sebab itu dikatakan bersedia kompromi dengan pihak Belanda. Dan Arudji Kartawinata termasuk golongan yang mengecam sikap lunak ini dan menuntut supaya memperlihatkan sikap keras terhadap Belanda.

Di samping itu, beberapa orang lama PSII di daerah juga mendesak para pemimpin mereka di pusat untuk mendirikan kembali partai. Para pemimpin PSII di daerah-daerah tersebut tidak melihat tokoh-tokoh PSII mempunyai kedudukan yang penting di Masyumi, sehingga mereka melihat Masyumi sebagai partai baru yang kurang mempunyai hubungan dengan partai-partai sebelum perang, khususnya PSII.

Akhirnya dengan beberapa alasan di atas maka PSII didirikan kembali tepat pada tanggal 27 April 1947 dan pimpinan PSII mengeluarkan pengumuman yang mengatakan bahwa PSII tidak mempunyai pertikaian dengan Masyumi. Dan PSII masuk kabinet semata-mata karena tanggung jawabnya terhadap negara yang sedang menghadapi ketegangan yang sangat serta kesulitan yang besar sehingga partai perlu menanggulangnya.

Anggaran dasar PSII sesudah perang sama dengan anggaran dasarnya sebelum perang, bahkan cita-cita dan pemikiran, PSII melanjutkan pemikiran yang terangkum dalam azas partai tahun 1933. Dan mungkin karena keterikatan ini yang membuat partai tersebut tidak dapat berkembang pada zaman merdeka.

b. Kiprah PSII dan Demokrasi Terpimpin

Partai Syarikat Islam Indonesia adalah merupakan salah satu partai politik Islam yang bertahan hidup dalam Demokrasi Terpimpin dan ikut berpartisipasi dalam kabinet dan parlemen. Partisipasi PSII dalam kabinet dari tahun 1957 sampai 1965 tidak memberi warna khas dalam kabinet tidak, karena itulah kedudukan politik umat Islam kurang berarti. Dalam kabinet Juanda (1957-1959) PSII memperoleh satu kursi yaitu sebagai Menteri Penerangan (Sudibyo). Kabinet tahun 1959 PSII tidak mendapatkan / memegang kursi inti dalam pemerintahan demikian juga dengan partai-partai Islam lain.

Pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang penetapan luas tanah pertanian (*landreform*; undang-undang no. 56/1960) yang bermaksud untuk mengurangi penderitaan orang-orang miskin di desa. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan menanggapi *landreform* ini PSII berpendapat positif. d kongresnya di Bandung tanggal 20-28 Mei 1962 partai ini sepenuhnya setuju dengan Undang-Undang Agraria menentukan

landreform itu. Kongres mengatakan bahwa *landreform* bukan saja "tidak bertentangan dalam hukum Islam" tetapi sesuai dengan maksud dan tujuan agama Islam.

Kabinet Soekarno sering terjadi perubahan yaitu tahun 1960, 1962, 1963, 1964. Dan pada tahun 1965 terjadi lagi *reshuffle* kecil. Kabinet 1060 PSII memperoleh satu kursi. Sudibyo sebagai pengerahan tenaga massa dan kementerian ini berubah nama pada tanggal 28 Maret 1961 menjadi kementerian penghubung dengan organisasi-organisasi rakyat setelah Front Nasional terbentuk.¹⁶

Tahun 1962 terjadi lagi *reshuffle* namun Sudibyo tetap dalam posisi semula. Kabinet 1962 ketua dan wakil parlemen dan MPR (S) diikutsertakan sebagai menteri dan Arudji Kartawinata masuk dalam kabinet tersebut karena *ex-officio*.

Kabinet tahun 1963 tercatat Sudibyo sebagai menteri/sekretaris jenderal Front Nasional juga Arudji Kartawinata duduk sebagai menteri *ex officio* seperti tahun 1962. Kabinet terakhir dari Demokrasi Terpimpin juga mencatat Sudibyo duduk dalam kursi yang sama demikian juga Arudji Kartawinata. Pada bulan Mei dan

¹⁶ Deliar Noer, 1987, Hal. 398-399.

Juni 1965 terjadi lagi kecil dalam kabinet dengan tanpa mengubah kedudukan wakil partai-partai Islam.

4. Nahdlatul 'Ulama

a. Sejarah berdirinya

Sejarah kelahiran Nahdlatul 'Ulama, kecuali didorong oleh para 'Ulama' untuk menjawab tantangan yang dihadapi dan merupakan tuntutan umat Islam yang muncul pada saat dekade ketida abad ke-20 an, juga didorong oleh maksud untuk membendung arus kegiatan golongan modernis yang dinilai menodai ajaran Islam, karena meninggalkan pendapat 'ulama' yang merupakan salah satu sumber hukum Islam. Golongan "modernis" adalah golongan stempel untuk menyebut eksponen Muhammadiyah yang telah lahir 15 tahun lebih awal dari organisasi Nahdlatul 'Ulama.¹⁷

Organisasi Nahdlatul 'Ulama didirikan di kota Surabaya tanggal 1 Januari 1926 oleh sekelompok 'ulama' dan kiai yang lebih ortodoks terutama yang berasal dari pesantren Jawa Timur dan Jawa

¹⁷ Rusli Karim, *Dinamika Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Hanindita, 1989)
Hal. 83

Tengah, bertekad untuk mempertahankan bentuk-bentuk kepercayaan dan praktek keagamaan tradisional. Sekalipun Nahdlatul 'Ulama pada mulanya merupakan organisasi sosial keagamaan, yang mana tujuan pertamanya sebagaimana terdapat dalam anggaran dasarnya, yaitu ingin mempertahankan dan mengembangkan Islam secara murni dan konsekuen dengan berpegang pada salah satu dari madzhab empat imam besar.

Dengan demikian, jelas kiranya bahwa Nahdlatul 'Ulama sejak semula bukan merupakan organisasi politik, di mana semua aspirasi politik para anggotanya dapat disalurkan ke mana saja, tergantung dengan keinginan dan kecocokan masing-masing anggota dalam menentukan pilihannya. Namun sebagai organisasi yang berdasarkan Islam, maka dalam sejarah *independen* nya terlihat bahwa warga Nahdlatul 'Ulama melibatkan dirinya dalam partai-partai politik Islam.¹⁹ Perkembangan Nahdlatul 'Ulama yang dimulai sejak muktamar IX telah melakukan berbagai perubahan yang cukup berarti, baik untuk kepentingan intern maupun untuk kepentingan ekstern, terutama dalam pembelaan tanah air.

¹⁸ Herbeth Feith, *Pemikiran Politik di Indonesia 1945-1965*, (Jakarta : LP3ES, 1988) Hal, 195

¹⁹ Rusli Karim, 1989, Hal. 84

Sebagai organisasi yang didukung oleh para 'ulama' yang mengakar pada masyarakat pedesaan, Nahdlatul 'Ulama memiliki sarana yang ampuh bagi kepentingan kaderisasi dan ikatan solidaritas umat Islam, yaitu melalui pesantren-pesantren sepanjang sejarahnya, kecuali beberapa pesantren yang tidak mempunyai hubungan dengan Nahdlatul 'Ulama. Namun pada hakekatnya Nahdlatul 'Ulama mengklaim pesantren adalah basis massa kekuatan umum Nahdlatul 'Ulama. Hal ini dapatlah dimaklumi, mengingat orientasi pendidikan dan pengajaran di pesantren sejalan dengan garis keagamaan yang di anut oleh Nahdlatul 'Ulama, tanpa mendapatkan pembaharuan,. Karena itu tidak janggal apabila organisasi ini disebut "tradisional" sehingga dikatakan pula bahwa Nahdlatul 'Ulama adalah "organisasi tradisional".

Sebelum melebur diri menjadi partai politik, aspirasi politik Nahdlatul 'Ulama disalurkan melalui Masyumi. Konggres Masyumi tahun 1949 di Yogyakarta memberi warna baru bagi politik, yaitu mengurangi peranan Majelis Syuro, yakni badan legislatif yang berada di tangan para 'ulama', di samping Majelis Dewan Partai yang dipegang oleh para politisi. Orientasi politik yang berlebihan dalam Masyumi berarti mengucilkan peranan ulama'. Fatwa-fatwa

ulama' kurang mendapatkan perhatian.²⁰ Maka dengan keadaan yang seperti inilah yang mendorong Nahdlatul Ulama setelah usulnya ditolak untuk menjadikan Masyumi sebagai badan federasi, akhirnya sesuai dengan keputusan kongres di Palembang pada tahun 1952 Nahdlatul 'Ulama resmi keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai politik yang berdiri sendiri. Keputusan tersebut sempat mengejutkan kalangan politik Islam yang memang sejak semula banyak yang meragukan kemampuan Nahdlatul 'Ulama sebagai partai politik yang berdiri sendiri, tetapi pada perkembangan selanjutnya Nahdlatul 'Ulama menunjukkan kemampuannya dalam berpolitik.

b. Kiprah Nahdlatul 'Ulama dalam Demokrasi Terpimpin

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin Nahdlatul 'Ulama merupakan partai politik Islam terbesar dan menjadi kiblat bagi partai-partai politik Islam lainnya, seperti Perti dan PSII. Bahkan Nahdlatul 'Ulama telah muncul sebagai imam perjuangan umat Islam seperti Masyumi. Sebagai imam, tentu saja partai ini akan senantiasa berdiri paling depan dalam barisan umat. Ada faktor obyektif, menurut kalangan

²⁰ Rusli Karim, 1993, Hal.103

Nahdlatul 'Ulama, mengapa partai ini punya ambisi untuk jadi imam umat pada masa Demokrasi Terpimpin, *Pertama* Nahdlatul Ulama mempunyai basis massa yang lebih besar, *Kedua*, Posisi politik Nahdlatul 'Ulama yang lebih baik dibandingkan dengan partai-partai politik Islam lainnya.²¹

Yang dimaksudkan dengan kekuatan massa umat yang terbesar itu dapat dilihat pada fakta sejarah bahwa nutelah berhasil muncul sebagai kekuatan politik ketiga dalam pemilihan umum 1955, setelah PNI dan Masyumi, sebagaimana telah kita singgung sebelumnya. Jadi secara kuantitatif, kekuatan massa Nahdlatul 'Ulama lebih unggul dari PKI sebagai kekuatan politik keempat berdasarkan yang besar, Nahdlatul 'Ulama merasa telah wajar bila bertindak sebagai imam politik umat.

Mengenai posisi politik Nahdlatul 'Ulama yang lebih baik dalam konteks NASAKOM memang tidak salah bila dibandingkan dengan posisi politik partai-partai kecil lainnya. Tapi bila kriteria yang dipakai adalah kriteria politik nasional, maka posisi Nahdlatul 'Ulama sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan posisi politik Soekarno, tentara dan Komunis. Dalam beraliansi dengan

²¹ Syfi'i Ma'arif, 1988, Hal. 98

Soekarno, PKI jelas lebih dipercaya ketimbang Nahdlatul 'Ulama dalam membuat *move-move* politik, satu-satunya posisi politik yang agak penting yang dipegang oleh Nahdlatul 'Ulama selama periode Demokrasi Terpimpin dan beberapa tahun setelah itu adalah kedudukan sebagai menteri agama. *Pertama* dipegang oleh KH. Wahib Wahab, sejak Juli 1959 sampai Februari 1962. Tetapi karena Wahib Wahab dituduh telah melanggar peraturan tertentu devisa negara, ia lalu diganti oleh teman seperjuangannya, yaitu KH. Syaifuddin Zuhri, yang berada di pos departemen ini sampai 1967.

Akan tetapi pengaruh politik Nahdlatul 'Ulama hampir tidak ada pada departemen-departemen yang lain. Dalam catatan sejarah setelah proklamasi kemerdekaan, pihak Nahdlatul 'Ulama memang belum pernah menduduki perdana menteri, sebagaimana halnya PNI, Masyumi, PSI dan bahkan PKI. Dalam demikian Nahdlatul 'Ulama belum pernah merasakan kedudukan sebagai orang pertama dalam pemerintahan. Tapi pada lembaga-lembaga legislatif, Zainul Arifin dari Nahdlatul 'Ulama telah diangkat menjadi ketua DPRGR, dan Idham Chalid sebagai wakil MPRS.

Alat politik yang lain adalah Front Nasional, suatu badan yang bersifat ekstra parlementer, yang dibentuk pada tahun 1960.

Dalam badan ini Nahdlatul 'Ulama menduduki sebagai wakil ketua. Ketuanya adalah Soekarno sendiri, dan dengan begitu ia secara perlahan dan leluasa ia membukakan pintu bagi PKI, sehingga front ini telah dikatakan telah dikuasai oleh komunis dalam kerangka NASAKOM.²²

Salah satu masalah yang menjadi perhatian Nahdlatul 'Ulama tentang Islam ialah soal pendidikan agama. Nahdlatul 'Ulama menyambut gembira pemberian mata pelajaran agama di perguruan tinggi mulai 1960 berdasarkan keputusan MPRS. Sebelumnya mata pelajaran agama diberikan dari tahun pertama Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Dan Nahdlatul 'Ulama memang dapat berbangga karena memang perubahan tersebut merupakan hasil kerja Nahdlatul 'Ulama dan teman partainya (PSI dan Perti) dalam masa Demokrasi Terpimpin. Dibukanya Institut Agama Islam Negeri di berbagai wilayah Indonesia juga merupakan hasil kerja Nahdlatul 'Ulama, karena Nahdlatul 'Ulama lah yang menangani pemeliharaan pengembanganny.

²² Deliar Noer, 1987, Hal. 393

Mengenai masalah kemerosotan ekonomi, Nahdlatul 'Ulama membicarakannya dengan pemerintah, seperti pada tahun 1962 Nahdlatul 'Ulama mengutus Saichu dan Kyai Musta'in kepada menteri pertama Djuanda agar pemerintah mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan. Tetapi bila rakyat mengeluh masalah ekonomi para pimpinan Nahdlatul 'Ulama menolak keluhan ini. Umpamanya ketua umum Nahdlatul 'Ulama, Idham Chalid meminjam jargon Soekarno dalam mengecam keluhan itu. Ia berkata bahwa mempergunakan kemerosotan ekonomi untuk menyalahkan pemerintah adalah perbuatan "kontra revolusi dan subversi". Sampai-sampai Muslimat Nahdlatul 'Ulama juga turut menyalahkan keluhan seperti itu.²³ Muslimat Nahdlatul 'Ulama menganjurkan ketabahan. Dan ketika Soekarno memerintahkan rakyat untuk hidup sederhana, Muslimat Nahdlatul 'Ulama ini juga turut menganjurkan hal yang sama dan memberi intruksi kepada para anggotanya untuk mematuhi dan melaksanakan perintah presiden itu.

Sementara itu partisipasi Nahdlatul 'Ulama dalam kabinet dari tahun 1957 hingga 1965 tidak memberi warna khas bagi kabinet

²³ Deliar Noer, 1987, Hal. 395

tersebut. dan Oleh sebab itu, kurang berarti buat kedudukan politik umat Islam. Dalam kabinet Djuanda (1957-1959) Nahdlatul 'Ulama mendapat jatah 4 kursi.²⁴ Namun hal tersebut tidak mempengaruhi keputusan kabinet. Karena Presiden Soekarno turut mencampuri soal pemerintahan. Idham Chalid ketua umum Nahdlatul 'Ulama yang menjadi wakil Perdana Menteri II tampaknya tidak sebanding dengan Perdana Menteri Djuanda dan wakil Perdana Menteri I, yaitu Parni Hadi (dari PNI). Kursi menteri lainnya yang dipegang oleh Nahdlatul 'Ulama adalah Menteri Perdagangan (Prof. Sunarjo), Menteri Agama (K.H.M. Ilyas) dan Menteri Agraria (Sunaryo).²⁵

Ketika kabinet Djuanda di-*reshuffle* pada pertengahan 1958, Nahdlatul Ulama berhasil mendapat jatah satu kursi lagi, yaitu untuk penghubung sipil-militer (dengan K.H. Wahib Wahab sebagai menterinya) dan di *reshuffle* ini Sunaryo yang menjabat sebagai Menteri Agraria digantikan oleh Rahmad Muljomiseno.²⁶

²⁴ Deliar Noer, 1987, Hal. 398

²⁵ *Ibid*, Hal. 398

²⁶ *Ibid*, Hal. 398

Kabinet tahun 1959 mengurangi jumlah menteri Nahdlatul 'Ulama menjadi dua dari kabinet yang terdiri dari 43 menteri. Yang dua ini termasuk K.H. Wahib Wahab (Menteri Agama) dan K.H.

Fatah Yasin (Menteri Muda Penghubung 'Ulama'). Dan tidak satupun dari partai-partai Islam manapun yang dipercaya memegang kursi inti.

Kabinet Soekarno diubah lagi tahun-tahun 1960, 1962, 1963, dan 1964. Pada tahun 1965 terjadi lagi *reshuffle* kecil. Kabinet 1960 mengikutsertakan K.H. Wahib wahab dalam kabinet inti, sebagai menteri Agama yang pada tanggal 2 maret 1962 diganti oleh K.H. Syaifuddin Zuhri. Sementara itu K.H. fatah yasin terus menduduki kursi menteripenghubung Alim Ulama' (yang ketika itu juga mencakup para pendeta)..

Reshuffle tahun 1962 mencatat Syaifuddin Zuhri dan fatah Yasin dalam pos-pos yang tetap. Kabinet 1962 mengikut sertakan ketua dan wakil ketua parlemen dan MPRS sebagai menteri. Dalam rangka ini termasuk Zainul Arifin (NU), ketua DPRGR, Idham Chalid (NU) juga sebagai Wakil Ketua II MPRS dan Arudji

²⁷ Deliar Noer, 1987, Hal. 398

Kartawinata (PSII) sebagai wakil Ketua II DPRGR. Oleh karena kedua badan ini lebih merupakan stempel bagi kebijaksanaan pemerintah, kedudukan pimpinannya sebagai menteri juga sekedar

mempunyai arti simbolis saja. Idham Chalid yang dalam kabinet Djuanda menjadi wakil perdana menteri ke-2, masuk kabinet 1962 karena *ex-officio*, dalam kedudukannya sebagai wakil ketua II MPRS. Memang peranan para tokoh partai politik Islam dalam masa kabinet-kabinet Soekarno sangat menurun. Para pemimpin partai politik lain seperti PNI, Parkindo, dan independen lebih menonjol peranannya di masa ini. Seperti Notohamiprojo (1962), Roeslan Abdul ghani (1963) yang keduanya sama-sama dari PNI, Leimena (1962) dari Parkindo, Chaerul Saleh dan Muhammad Yamin (independen) yang selama periode itu dipercaya menjadi anggota inti kabinet, di samping orang-orang militer.

Kabinet 1963 mencatat nama K.H. Syaifuddin Zuhri sebagai Menteri agama dan K.H. Fatah Yasin sebagai Menteri Penghubung Alim Ulama'. Sementara Idham Chalid duduk sebagai menteri *ex-officio* seperti tahun 1962, begitu juga dengan Achmad Saichu sebagai Wakil Ketua DPRGR.

Kabinet terakhir dari masa Demokrasi Terpimpin juga mencatat nama Syarifuddin Zuhri dan Fatch Yasin pada kursi yang sama. Demikian juga dengan Idham Chalid dan Ahmad Saichu secara *ex-officio*. Pada bulan Mei dan Juni 1965 *reshuffle* kecil terjadi dalam kabinet tanpa mengubah kedudukan wakil partai-partai politik Islam.²⁸ []

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁸ Deliar Noer, 1987, Hal.399

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menghadapi Demokrasi Terpimpin partai-partai politik Islam terklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu kelompok *Pertama*, adalah kelompok yang kontra terhadap Demokrasi Terpimpin. Kelompok ini diwakili oleh Masyumi yang memandang bahwa ikut serta dalam sistem politik otoriter adalah sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Sedangkan kelompok *Kedua*, adalah kelompok yang pro terhadap Demokrasi Terpimpin, antara lain NU, PSII dan Perti, mereka memandangi turut serta dalam sistem Demokrasi Terpimpin adalah sikap pragmatik dan realistik.
2. Dalam Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menempatkan dirinya sebagai pusat seluruh jaringan kekuasaan. Meskipun demikian masih ada dua pemegang kekuasaan yang turut memainkan jalannya roda pemerintahan, yaitu, PKI dan ABRI, khususnya TNI AD. Sedangkan partai politik lainnya khususnya partai-partai politik Islam sengaja dibuat tidak berdaya oleh Presiden Soekarno.

3. Dalam menghadapi budaya yang serba otoriter, partai politik yang bersikap agresif akibatnya berbahaya bagi survival partai itu, seperti Masyumi dan PSI yang dibubarkan pada tahun 1960. Sedangkan partai politik Islam lainnya seperti NU, PSII dan Perti yang bersikap kompromis-akomodatif diperbolehkan hidup dan dapat duduk dalam pemerintahan. Meskipun peranan yang dimainkan kurang kurang diperhitungkan, akan tetapi setidaknya mereka dapat menghalau gerakan-gerakan yang dilancarkan oleh PKI, misalnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G. 30 S/PKI).

B. Saran-saran

1. Dalam menghadapi sistem pemerintahan yang multi partai, hendaknya seluruh komponen bangsa bersikap arif dan bijaksana serta mampu menahan diri. Sebab gesekan-gesekan pandangan antar partai politik sudah pasti akan terjadi dan akan berakibat fatal bagi tujuan yang hendak dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
2. Peran apapun yang didapatkan dan diperoleh di dalam pemerintahan, janganlah di sia-siakan, sebab itu lebih berarti dari pada tidak mendapatkan peran sama sekali. []

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Alfian, Ibrahim , T. *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1990
- Amin, SM, *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967
- Anam, Chairul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul 'Ulama*, Solo, jatayu, 1985
- Anshari, Endang Syaifuddin, *Piagam Jakarta 22 juni 1945*, Jakarta, rajawali Press, 1986
- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1981
- Aziz Thaba, Abdul, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta, Gema Insani, 1996
- Baharuddin, A.Z. Abidin, *Bahaya komunis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1982
- Bolland, .BJ, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta, Grafitti Press, 1985
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta, LP3ES, 1990
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Panda Politik Islam di Pentas Nasional, Jakarta, Garfitti Pers, 1987
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai pustaka, 1989
- Ensiklopedi Indonesia Demiliterisasi*, Yayasan Kanisius, 1973
- Ensiklopedi Nasional Indonesia IV*, Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 1989
- Ensiklopedi Umum*, Jakarta , Yayasan kanisius, 1973
- Feith, Herbeth, *Pemikiran Politik di Indonesia 1945-1965*, Jakarta, LP3ES, 1988
- Ganis Harsono, *Cakrawala Politik era Soekarno*, Jakarta, Idayu Press, 1985

- Kusnadi, Mohammad dan Saragih, Bintan, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta, Gramedia, 1994
- Mawardi, Shalid, *Practica Politica Nahdlatul 'Ulama*, Jakarta, yayasan Pendidikan, tt
- Muhono, *Himpunan Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara Yang Penting Bagi Angkatan Bersenjata, Tentara TNI*, 1966
- Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984
- , *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Jakarta, yayaasan Idayu, 1978
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976
- Pranaka, AMW, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Jakarta, Yayasan Proklamasi, 1981
- Rusli Karim, M, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 1993
- , *Dinamika Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Hanindita, 1989
- Simorangkir, J.C.T, *Penetapan UUD di Lihat Dari Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 1984
- Soekarno, Ir, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1964
- Soepardo Dkk, *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*, Balai Pustaka 1962
- Suny, Ismail, *Pergeseran Eksekutif Penyelidikan Hukum Tata negara*, Jakarta, Aksara Baru,
- Syafi'i Ma'arif, A., *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta , LP3ES, 1985
- , *Islam dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988

Syamsuddin, Nasaruddin, Soekarno *Pemikiran Politik dan
Praktek* Jakarta: Raja Graafindo Persada, 1993
Yulis, S. *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, Surabaya, Usaha
Nasional, 1984

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id